

LAPORAN PENELITIAN
PERAN AGAMA DALAM MEREDAM KONFLIK PASIR BESI
DI PESISIR KULON PROGO YOGYAKARTA



OLEH
Dra. Hj. ERMİ SUHASTI S., MSI.

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan, eksistensi konflik sangat urgen. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan tegak tanpa ada konflik, sehingga yang perlu bagi manusia adalah bagaimana cara memadukan dan mencari solusi agar konflik tersebut tidak menimbulkan kerusakan, namun sebaliknya dapat membantu manusia mewujudkan keseimbangan dan tumbuhnya pola introspeksi diri dalam sebuah komunitas masyarakat. Konflik isu rencana pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Di satu sisi pertambangan tersebut akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian sebagai petani. Di sisi yang lain Islam tidak melarang memanfaatkan alam, dengan menetapkan aturan mainnya. Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian bahwa lahan pasir besi di pesisir akan menjadi subur setelah reklamasi, karena kandungan logamnya sudah diangkat. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran Islam dalam mereduksi konflik pasir besi di pesisir Kulon Progo.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab munculnya konflik pasir besi di pesisir Kulon Progo, yaitu: ekonomi, politik, dan perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. *Pertama*, faktor ekonomi, masyarakat di sana mempunyai pemikiran bahwa belum tentu penghasilan sebagai buruh penambang pasir besi itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai petani sebab hasil produksi pertanian mereka jauh lebih tinggi. Penambangan pasir besi akan mengganggu dan mengurangi produksi pertanian mereka yang sudah lama mereka bangun. Contoh lainnya adalah penghapusan lapangan kerja masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kulonprogo di sekitar daerah penambangan. *Kedua*, faktor politis. Penambangan ini pun memiliki muatan politis yang sangat jelas terutama perihal keberpihakan kesultanan terhadap pihak swasta, bahkan banyak kabar yang beredar bahwa perusahaan yang menangani penambangan ini berasal dari kerabat kraton. *Ketiga*, faktor perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. Pihak yang pro mempunyai pandangan bahwa tanah akan semakin subur setelah dieksplorasi kemudian direklamasi, sebaliknya pihak yang kontra mempunyai pandangan bahwa penambangan akan merusak lingkungan.

Peran agama dalam meredam konflik konflik pasir besi di Pesisir Kulon Progo belum maksimal, antara lain karena kurangnya komunikasi atau musyawarah antara pihak yang sedang berkonflik, yaitu pihak yang mendukung dan menolak penambangan pasir besi. Tokoh agama dari pihak yang pro dan kontra penambangan mengutamakan kepentingan politisnya dan organisasinya. Ulama memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada kelompoknya, tetapi tidak kepada kelompok yang lain.

Kata Kunci: *Islam, konflik, pertambangan, pasir besi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak.

Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran Agama Dalam Meredam Konflik Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo”, dengan kerja keras dan bantuan berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud. Pada kesempatan kali ini peneliti menghairkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Mardjoko Idris, MA.
2. Segenap Karyawan Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap karyawan Kantor KESBANGLINMAS dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Asisten peneliti yang mengalami berbagai kendala di lapangan: Ihab Habudin, Hilman Nugraha, Muh. Amir Yusuf, M. Muhtar Natsir.
5. Suamiku Lukito E. Nugroho dan anak-anakku Rizka, Satria, Prasetyo dan Tresnajati yang selalu memberi spirit dan motivasi.

6. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri peneliti, terutama tentang sulitnya minta izin ke Kabupaten Kulon Progo. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Yogyakarta, 19 November 2012

Peneliti



Dra. Ermi Suhasti S., MSI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AGAMA, KONFLIK DAN PERTAMBANGAN	
A. Agama	16
B. Konflik	21
C. Pertambangan	29
BAB III PENAMBANGAN PASIR DI PESISIR KULON PROGO	
A. Gambaran Umum Wilayah Penambangan	37
B. Wacana Penambangan Pasir Besi	40
C. Pro dan Kontra Penambangan	50
D. Manfaat Penambangan Pasir Besi	58
BAB IV PERAN AGAMA DALAM MEREDAM KONFLIK PASIR BESI DI PESISIR KULON PROGO	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial, sehingga muncul pertentangan dan kesamaan untuk melahirkan perubahan sosial. Situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama, lebih dikenal dengan istilah konflik. Konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Eksistensi konflik sangat urgen sekali dalam kerangka peningkatan kualitas kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan tegak tanpa ada konflik, sehingga yang perlu bagi manusia adalah bagaimana cara mereka memadukan dan mencari solusi agar konflik tersebut tidak menimbulkan kehancuran (kerusakan), namun sebaliknya dapat membantu manusia mewujudkan keseimbangan dan tumbuhnya pola introspeksi diri dalam sebuah komunitas masyarakat.

Jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa, sangat plural jika dilihat dari aspek agama dan etnis. Secara kuantitatif penduduk Yogyakarta yang beragama Islam sebanyak 91,38%, Kristen 2,88%, Katholik 5,38%, Hindu 0,17%, Budha 0,16%, lainnya 0,03%.¹ Penduduk yang bertempat

¹ Data Sensus BPS tahun 2010

tinggal di daerah perkotaan sebanyak 2 297 261 jiwa (66,44 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 1 160 230 jiwa (33,56 persen).

Masyarakat Yogyakarta yang dikenal sebagai masyarakat pluralis sangat menghargai keberagaman. Kemampuan warga Yogyakarta untuk mengakomodir budaya yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai pelosok tanah air menghasilkan sebuah harmonisasi baru antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan pendatang. Sehingga sangat jarang kita menjumpai terjadinya benturan budaya yang berujung pada konflik horizontal di masyarakat. Masing-masing kelompok agama, etnis dan suku mendapatkan ruang untuk dapat mengekspresikan budaya mereka sepanjang tidak menciptakan disharmoni di masyarakat.

Meskipun keselarasan telah menjadi jantung kehidupan masyarakat Yogyakarta, bukan berarti Yogyakarta tidak pernah terpercik aksi kekerasan dan konflik agama, politik maupun etnis. Namun konflik dan kekerasan yang terjadi di Yogyakarta tidak berskala luas, seperti konflik bernuansa SARA di Ambon, Poso, dan Sampit Kalimantan, atau kerusuhan rasial anti-China yang terjadi di daerah lain.² Pada masa reformasi tahun 1998, Yogyakarta merupakan salah satu dari sedikit kota besar di Indonesia yang terbebas dari kerusuhan massal. Meskipun terjadi demonstrasi dan aksi massa, namun tidak sampai berakhir dengan aksi

² Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal 61.

anarkis.³ Kekerasan sosial yang sering terjadi di Yogyakarta adalah pada musim pemilu, baik pada zaman orde baru maupun pasca reformasi 1998.⁴

Aksi kekerasan bernuansa agama di Yogyakarta mayoritas didominasi oleh konflik pendirian tempat ibadah.⁵ Sebagian kelompok Muslim menganggap bahwa pendirian gereja sebagai bagian dari usaha kristenisasi sehingga ada ketakutan bahwa keberadaan gereja itu akan mengancam posisi umat Islam. Ada kekhawatiran jika jumlah umat Islam akan berkurang. Sementara para aktivis pluralisme sering menyatakan bahwa pangkal masalah dari konflik pendirian tempat ibadah adalah adanya kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No. 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Konflik sosial yang terjadi di Yogyakarta pada bulan April sampai awal Mei 2012, sangat mengganggu sendi-sendi kemanusiaan warga Yogyakarta.

³ Kerusuhan pada tahun 1998 akibat bentrok antara aparat dan demonstran, namun tidak sampai ada aksi penjarahan dan konflik SARA. Puncaknya terjadi pada 8 Mei 1998 di jalan Gejayan yang memakan korban bernama Moses Gatutkaca. Lihat Kompas tanggal 10 Mei 1998

⁴ Sultan HB IX harus turun tangan mendamaikan kelompok pendukung partai politik pada masa kampanye pemilu 1982, lihat Bambang Purwantono, "Kekerasan dan Kriminalitas pada masa Transisi," makalah pada The 1st International Conference on Urban History, Surabaya 23-25 Agustus 2004.

⁵ Disarikan dari berbagai sumber terutama harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat dari tahun 1997 sampai tahun 2006. Lihat Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk...*, hal 64. Lihat Franz Magnis Suseno, "Izin Mendirikan Rumah Ibadah", Kompas, 10 September 2005, yang mengutip pendapat Habib Rizieq, ketua FPI, bahwa SKB tersebut multitafsir sehingga sering disalahgunakan oleh aparaturnegara untuk menutup rumah ibadah. Kalau SKB itu dicabut, sedang umat Islam setempat masih curiga terhadap umat Kristiani, gereja tetap tidak akan mungkin dibangun. Sebaliknya, jika SKB tidak dicabut, tetapi di antara umat Islam dan Kristiani terjalin hubungan kepercayaan, gereja dengan mudah dapat dibangun.

Beberapa konflik yang tercatat, antara lain: *Pertama*, konflik sengketa tanah yayasan antara SMA 17 dan ahli waris.⁶ *Kedua*, Perebutan tahta di Pakualaman, menyebabkan ada masyarakat yang Pro dan Kontra pengukuhan Anglingkusuma sebagai Paku Alam ke IX.⁷ *Ketiga*, Bentrok antara warga dan mahasiswa pada Rabu, 9 Mei 2012.⁸ *Keempat*, penyerangan ormas ke kantor LKIS saat berlangsung diskusi yang menghadirkan aktivis Irshad Manji.⁹ *Kelima*, konflik pasir besi di Kulon Progo.¹⁰

Konflik pasir Besi di Kulon Progo adalah sebuah konflik yang paling menarik, karena pada tahun 2006 semua warga pesisir selatan Kulon Progo sepakat menolak penambangan pasir, tetapi dua tahun kemudian kesepakatan itu

⁶ Sumber Harian Kompas, Harian Jogja, dan Republika pada Rabu, 11 April 2012.

⁷Pengukuhan KPH Angling Kusumo sebagai Paku Alam ke-IX di Kulon Progo pada Minggu, 15 April 2012, terlihat janggal karena tidak berlangsung sesuai dengan atribut dan tata cara Pakualaman. Selengkapnya lihat, ‘Sultan: Pengukuhan PA Ada Tata Caranya’, Kompas, Rabu, 18 April 2012.’ Warga Gunung Kidul tolak Pengukuhan Anglingkusuma’, Tribun Jogja, Kamis, 3 Mei 2012. ‘Pakualaman Peringatkan kembali Anglingkusumo’ Kompas, Kamis, 3 Mei 2012 dan Harian Jogja, Rabu, 25 Mei 2012

⁸ Lihat ‘Bentrok: Warga Glendongan, Tambak Bayan belum berani keluar rumah’, Harian Jogja, Rabu, 9 Mei 2012. ‘Sultan: Pendetang jangan Paksakan Kehendak’, Harian Jogja, Sabtu, 12 Mei 2012

⁹ Sejumlah pihak menolak kedatangan Irshad Manji, penulis buku *Allah, Liberty and Love*. Rektor UGM membatalkan, sedang di UIN Sunan Kalijaga Irshad tidak datang. Selengkapnya , ‘Dialog Irshad dibubarkan Ormas’, Harian Jogja, Kamis, 10 Mei 2012. Aksi anarkistis organisasi massa Majelis Mujahiddin Indonesia atas pembubaran paksa diskusi pada Rabu malam, 9 Mei 2012 di kantor LKIS, Bantul Yogyakarta, menyebabkan perusakan dan penganiayaan. Lihat, ‘Pelaku diadukan ke Polisi dan Komnas HAM’, Kompas, Jum’at, 11 Mei 2012. Dan ‘Unjuk Rasa Menentang Aksi Kekerasan’, Kompas, Sabtu, 12 Mei 2012

¹⁰ Lahan pesisir di Kulon Progo awalnya untuk pertanian kemudian pada tahun 2006 dimasukkan peruntukannya untuk pertambangan. Awalnya bentuk penolakan beroperasinya penambangan pasir besi oleh masyarakat pesisir selatan Kulon Progo benar-benar massif, terutama warga pesisir di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur. Namun, lambat laun tekad sejumlah masyarakat untuk menolak penambangan tersebut terpecah, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. ‘The Jewel fo Java’, Harian Jogja, 9 Mei 2012

pecah. Sebagian warga tetap menolak tambang pasir besi, tetapi sebagian warga ada yang mendukung. Hal ini mengakibatkan walaupun warga pesisir hidup satu desa tetapi bermusuhan. Permusuhan ini menyebabkan kurangnya interaksi antara kelompok pendukung dan kelompok yang menolak penambangan. Konflik pasir besi di Kulon Progo selama enam tahun ini tidak menimbulkan tindak kriminal, tetapi bila interaksi antar dua kelompok masyarakat ini tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada tindakan kriminal. Konflik antara dua kelompok inipun dapat menyebabkan wilayah ini terabaikan dari berbagai upaya pembangunan, sehingga akselerasi pembangunan menjadi rendah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya konflik pasir besi pada masyarakat pesisir di Kulon Progo?
2. Bagaimana manfaat agama dalam meredam konflik pasir besi pada masyarakat pesisir Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik pasir besi pada masyarakat pesisir di Kulon Progo

2. Menjelaskan manfaat agama dalam meredam konflik pasir besi pada masyarakat pesisir Kulon Progo.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi upaya antisipasi dan solusi terhadap terjadinya konflik sosial yang bernuansa pengalihan lahan, terutama dari lahan pertanian beralih ke industri pertambangan.
2. Sebagai informasi kualitatif tentang beberapa aspek interaksi antar kelompok masyarakat yang tinggal satu desa tetapi saling bermusuhan.
3. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam menemukan metode yang tepat saat memasuki situasi konflik di masyarakat serta menemukan pola-pola pendekatan sosial yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

D. Telaah Pustaka

Mahrudin menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang dapat dikategorikan sebagai sumber konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat lokal pada pertambangan nikel di Kabupaten Buton. *Pertama*, komunikasi yang mandeg antara perusahaan, aparat pemerintah dan masyarakat lokal; *kedua*, konflik yang timbul karena ganti rugi dari aktifitas penambangan. Solusi atau pemecahan konflik dikawasan pertambangan sangat ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi antara ketiga unsur pelaku kegiatan dikawasan tersebut. Karena itu, modal penyelesaian konflik sebagai solusi awal untuk daerah pertambangan dapat dilihat dari beberapa aspek yang melibatkan ketiga pelaku

utama tersebut secara proporsional, yaitu; Aspek regulasi dan aspek *community development* ¹¹

Musta'in Mash'ud berpendapat buruknya kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kegiatan industri di Jawa Timur tidak lepas dari paradigma pembangunan di Jawa Timur yang memanjakan pencemar dan mengabaikan dampak aktivitas industri terhadap lingkungan hidup. Disamping itu pada tahun 2005 memunculkan 7 konflik lingkungan yang melibatkan aksi massa seperti pemblokiran dan menjurus pada aksi anarkis. Aksi-aksi ini didasari oleh kejengkelan masyarakat korban pencemaran. Pemerintah Propinsi harus tegas menindak kejahatan lingkungan yang dilakukan industri pencemar, baik dengan upaya pembinaan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan maupun penegakkan hukum lingkungan yang tegas. ¹²

Hasil penelitian Ince Raden menyimpulkan bahwa pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan, yaitu meningkatkan pendapatan perbulan, memberikan peluang kerja dan peluang usaha sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Dampak negatifnya adalah meningkatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh masalah limbah, penerimaan tenaga kerja, masalah tumpang tindih lahan, dan tidak optimalnya perusahaan dalam

¹¹Mahrudin, "Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton", Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, hal 187-204.

¹² Mustain Mash'ud, "Dampak Konflik Lingkungan Hidup: Perspektif Sosial, Budaya dan Politik," Jurnal Sosial-Politika, Vol. 15, No. 2, Desember 2008, hal 195-214.

melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dampak lainnya adalah menurunnya aktivitas keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong terutama kerja bakti dan kegiatan keagamaan, tetapi sekaligus juga memberi dampak positif terhadap kepedulian pemberian bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia dan biologi. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya kerusakan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, rusaknya flora dan fauna endemik, meningkatnya polusi udara dan debu, erosi dan sedimen yang memicu banjir, kebisingan, rusaknya jalanan umum yang digunakan untuk memuat alat-alat berat perusahaan, dan adanya limbah yang dapat masuk ke lahan-lahan pertanian dan sungai sehingga merusak sumber air yang digunakan untuk air bersih. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara didominasi oleh pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa dan bantuan di bidang kesehatan.¹³

Imam Subkhan berpendapat bahwa konflik dapat diminimalisir bila ada agenda ketulusan membangun dialog dan membuka prasangka di tingkat basis, Negara juga punya kewajiban menjamin hak-hak warganya. Misalnya hak untuk hidup aman tanpa ancaman dalam menjalankan kepercayaan dan agamanya, jaminankebebasan beribadah, berpendapat dan berkumpul. Tapi melihat fakta ketidakberdayaan penegak hukum menghadapi kelompok-kelompok yang

¹³ Ince Raden, dkk., "Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara", Jakarta: BPP, Kementerian Dalam Negeri, 2010.

memaksakan kehendak mereka sehingga melanggar hak orang lain. Jalan yang paling mungkin adalah kembali ke praktik keseharian, yaitu wacana dan relasi kemanusiaan yang kita selami sehari-hari, yang terkadang dianggap remeh, namun sesungguhnya punya peran besar dalam membangun kelenturan sosial atau yang dikenal dengan istilah toleransi dan pluralisme, yang tidak dibebani oleh narasi-narasi.¹⁴

Dalam penelitian kuantitatif, Ibnu Syamsi menjelaskan bahwa agama mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap konflik sosial masyarakat di kelurahan Condongcatur. Penelitian yang menggunakan regresi ganda menunjukkan sumbangan efektif variabel bebas adalah 21,6%, dan masing-masing sumbangan variabel bebas, yaitu agama 10,8 % terhadap konflik sosial masyarakat, kelas sosial 2,2 %, budaya 3,0 %, suku 2,3 %, kepentingan 0,7 % dan pribumi-non pribumi 2,6 %. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam konflik sosial masyarakat Condongcatur: agama, budaya, pribumi-nonpribumi, suku, kelas sosial, dan kepentingan. Sedangkan sisanya adalah *unique factor*¹⁵

E. Landasan Teori

Konflik sosial dapat diartikan dua hal: *pertama*, perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap

¹⁴ Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme...*, hal 136

¹⁵ Ibnu Syamsi, "Potensi Konflik Sosial Masyarakat di Kelurahan Condong Catur, Yogyakarta," *Jurnal Fondasia*, No. 9/Vol.1, Tahun ke-VIII, 2009, hal 24-38.

aspek interaksi manusia dan struktur sosial; *kedua*, pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan.¹⁶ Jenis konflik umumnya berlangsung dalam konteks hubungan saling tergantung dan hubungan pertukaran yang melembaga, sehingga jenis konflik yang satu dengan yang lain selalu terdapat kemiripan, meskipun variasi juga selalu ada. Dari berbagai jenis konflik tersebut, ada tiga varian terpenting yang saling terkait, yakni *pertama*, karakter pihak yang berkonflik, *kedua*, hakekat tujuan serta *ketiga*, sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri.¹⁷

Pertama, pihak yang berkonflik pada pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo mulanya antara pemerintah yang mendukung perusahaan pertambangan dengan masyarakat yang menolak perusahaan tersebut. Seiring perjalanan waktu konflik berubah semakin kompleks, karena yang terjadi kemudian adalah konflik antara warga yang mendukung dan warga yang menolak perusahaan pertambangan tersebut. Warga yang mendukung dan warga yang menolak berada dalam satu desa bahkan mereka hidup berdampingan atau bertetangga, tetapi tidak ada relasi yang harmonis di antara mereka.

Kedua, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan. Semula lahan pesisir selatan Kulon Progo diperuntukkan untuk pertanian, tetapi pada tahun 2006 ada pengalihan lahan, yaitu untuk pertambangan. Tujuan atau kepentingan yang terlibat di dalamnya memiliki makna atau kepentingan yang

¹⁶ *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Adam Kuper, Jessica Kuper; penerjemah, Haris Munandar, Ed.1 Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. hal. 155

¹⁷ *Ibid.*, hal 156

berbeda. Pemerintah Daerah Kulon Progo mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan pemasukan atau pendapatan Daerah. Perusahaan mempunyai kepentingan ekonomi, keuntungan yang tinggi. Masyarakat yang mendukung pertambangan berharap dapat bekerja dan mendapat fasilitas. Masyarakat yang menolak perusahaan pertambangan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain: lingkungan pertanian akan berubah menjadi lingkungan industri pertambangan, polusi dan limbah kimia, para pemuda desa lebih tertarik menjadi buruh tambang daripada mengolah tanah untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Ketiga, konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara yang digunakan oleh pemerintah Daerah Kulon Progo kepada masyarakat sekitar pesisir adalah membujuk masyarakat pesisir selatan untuk mendukung pertambangan dengan menjelaskan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh masyarakat sekitar pesisir selatan Kulon Progo. Misalnya, meningkatkan pendapatan perbulan, memberikan peluang kerja dan peluang usaha sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat.

Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial

sekelilingnya.¹⁸ Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, warga yang menolak perusahaan pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo dan warga yang mendukung perusahaan pertambangan tersebut. Konflik yang terjadi bertahun-tahun menurut Coser akan memperkuat identitas kelompok.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (*safety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur.¹⁹

Coser membagi konflik menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan umumnya ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya warga yang menolak perusahaan tambang pasir

¹⁸ Lewis Coser , *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956, hal.151-210 atau lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik, akses 19 Mei 2012

¹⁹ Ibid

besi di pesisir Kulon Progo demonstrasi secara tertib dengan berjalan sepanjang dua kilometer, agar tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah.²⁰

2. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Coser menjelaskan bahwa ada suatu kemungkinan seseorang atau kelompok terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Misalnya, warga yang mendukung tambang pasir besi akan agresif melindungi kelompoknya, tetapi setelah berada di luar desa warga yang pro dan kontra pasir besi melupakan perbedaan dan berinteraksi atau komunikasi secara aktif.

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa

²⁰ 2.500 petani dari enam desa: Banaran, Karangsewu, Bugel, Pleret, Garongan, dan Karangwuni mengarak gunung hasil bumi dari desa Karangsewu ke desa Garongan, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, orasi perjuangan, dan mujahadah. Lihat, “6 tahun PPLP konsisten tolak tambang pasir besi” Suara Merdeka, Senin, 2 April 2012 2/4-2012.

permusuhan.²¹ Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan sesama pedagang, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut. Contoh, seperti konflik antara suami istri, seluruh kerabat suami masuk kelompok yang pro pasir besi, sementara semua kerabat istri masuk kelompok yang kontra pasir besi.

Coser menjelaskan bahwa untuk meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok, dia mendapatkan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan.²² Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik *in-group* merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser

²¹ Ibid

²² Lewis Coser, 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press. page. 32-70

menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.²³

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu mencari data secara langsung ke pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di kecamatan Temon, Galur, Panjatan dan Wates . Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan dan menganalisis konflik masyarakat pesisir di Kulon Progo. Sumber data: *pertama* adalah mewawancarai warga yang terlibat langsung dengan konflik. Jumlah responden 4 orang, terdiri dari warga yang pro dan yang kontra pada tambang pasir besi, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan; *kedua* adalah dokumentasi yang berkaitan dengan konflik pasir besi di pesisir Kulon Progo. Dalam melakukan penelitian, jumlah tim peneliti terdiri dari 1 peneliti utama, 2 anggota peneliti dan 2 tenaga pendukung (mahasiswa).

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berdasarkan pada teori konflik Lewis A. Coser. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu penalaran yang berawal dari data warga yang pro dan yang kontra pada perusahaan tambang pasir besi di pesisir Kulon Progo.

²³ Ibid.

BAB II

AGAMA, KONFLIK DAN PERTAMBAHAN

A. Agama

1. Pengertian Agama

Agama, yang dalam bahasa Arab disebut *din*, secara sederhana mengandung makna: aturan, ketentuan, atau petunjuk yang wajib ditaati oleh pemeluknya demi mencapai kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan.

Khusus mengenai makna yang terkandung dalam sebutan *din* untuk menunjuk kepada arti "agama", jika dimaknai melalui pendekatan kajian semantik, dapat dipahami sebagai : berutang, dekat, maupun rendah. Hal itu ditemukan apabila ditelusuri kata-kata yang terbentuk melalui susunan huruf-huruf yang membentuk lafaz *din* tersebut yaitu masing-masing : *d*, *y*, dan *n*. Dari ketiga huruf tersebut terbentuk kata-kata: *daen* (hutang), *danaa'* (dekat), dan *dani`* (rendah atau hina).¹

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`a*, (Jakarta Lentera Hati, 1995), hal. 87.

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.²

2. Fungsi Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama memiliki fungsi yang vital, yakni sebagai salah satu sumber hukum atau dijadikan sebagai norma. Agama telah mengatur bagaimana gambaran kehidupan sosial yang ideal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama juga telah memberikan contoh yang konkret mengenai kisah-kisah kehidupan sosio-kultural manusia pada masa silam, yang dapat dijadikan contoh yang sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat di masa sekarang. Kita dapat mengambil hikmah dari dalamnya.

Minoritas beranggapan bahwa agama tidak ada relevansinya dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang, tetapi mayoritas mengakui bahwa setidaknya agama mempunyai peran bagi kehidupan, bahkan dapat dijadikan pelajaran yang berharga, misalnya agar tidak terjadi tragedi yang sama di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, sekarang banyak terdengar suara-suara miring mengenai Islam. Banyak orang kafir yang memanfaatkan situasi ini untuk memojokkan umat Islam di seluruh dunia dengan cara menyebarkan kebohongan-kebohongan, menghembuskan fitnah yang deras ke dalam tubuh masyarakat Islam, sehingga membuat umat Islam itu sendiri merasa tidak yakin dengan keimanannya sendiri.

² <http://kamusbahasaIndonesia.org/agama> akses 19 November 2012

3. Agama dalam Masyarakat

Agama berperan mengatur tentang bagaimana membentuk masyarakat yang madani. Agama juga yang mampu menciptakan kerukunan dalam kultur masyarakat yang majemuk. Seperti yang kita ketahui bahwa tidaklah mudah untuk hidup dalam perbedaan. Setiap perbedaan, utamanya perbedaan pendapat yang ada di masyarakat dapat memicu timbulnya perselisihan. Di sinilah posisi agama memainkan perannya yang penting sebagai penegak hukum dan menjaga agar masyarakat saling menghormati dan tunduk pada hukum yang berlaku. Jika dalam masyarakat agama sudah tidak dianggap memegang peran yang penting, dapat dipastikan kehidupan sosial masyarakat tersebut akan mengalami dekadensi moral dan kekacauan yang nantinya bakal meluas ke lingkup yang lebih luas, yakni bangsa dan negara. Dan ini merupakan ciri dari akan hancurnya dunia! Yah, kiamat sudah dekat jika agama telah hilang dari sendi-sendi kehidupan.

Agama memainkan perannya yang sentral dalam hal kultur maupun kehidupan sosial kemasyarakatannya melalui nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Diantara sekian banyak nilai-nilai yang terdapat dalam agama tersebut, nilai luhur yang paling banyak dan paling relevan dengan sosial kemasyarakatan adalah nilai spiritual yang tetap menjaga agar masyarakat tetap konsisten dalam menjaga stabilitas lingkungan, serta nilai kemanusiaan yang mengajarkan manusia agar dapat saling mengerti satu

sama lain, serta dapat saling bertenggang rasa. Saling memahami antar masyarakat merupakan langkah awal yang bagus untuk membentuk masyarakat yang madani.

Peran agama semakin kuat ditandai dengan semakin kuatnya peran ilmu pengetahuan yang diramalkan akan mencabut peran agama dalam masyarakat. Namun ramalan itu ternyata tidak sepenuhnya tepat, hingga kini kita masih melihat kecenderungan kuatnya peran agama dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern di kota-kota besar Indonesia, misalnya, menggambarkan adanya kegairahan dalam beragama. Maraknya acara-acara keagamaan dan bermunculannya tokoh-tokoh pendakwah muda menunjukkan adanya permintaan yang sangat besar dari masyarakat kota terhadap otoritas agama. Dalam industri televisi juga dapat dilihat dari begitu tingginya rating acara-acara yang bernuansa agama.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa semakin modern sebuah masyarakat tidak serta merta menggeser peran agama dalam kehidupan mereka. Dalam hal-hal tertentu memang kita saksikan adanya pergeseran. Dahulu, hampir semua persoalan sosial yang dialami masyarakat biasanya akan dikonsultasikan kepada tokoh agama. Mereka menjadi konsultan dari persoalan publik hingga problem keluarga. Modernisasi kemudian menggeser peran itu. Persoalan sosial tersebut kini sudah terfragmentasi dalam lembaga-lembaga khusus sesuai dengan keahlian dari pengelola lembaga tersebut. Jadi, dalam batas-batas tertentu modernisasi atau

perkembangan ilmu pengetahuan memang telah menggeser posisi agama. Namun itu tidak serta merta dapat dimaknai bahwa agama akan kehilangan fungsi dan menghilang dengan sendirinya.

Di masa modern, yang ditandai dengan ketersediaan berbagai fasilitas hidup yang memungkinkan manusia, terutama yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi, untuk mencapai kebutuhan utamanya dengan mudah, agama tetap diperlukan. Bahkan sebaliknya, mengabaikan tuntunan agama dalam kehidupan modern, akan berakibat munculnya mala petaka bagi umat manusia secara meluas sebab manusia-manusia modern, yang tanpa bimbingan agama, akan bebas mengikuti kecenderungan nafsu serta keinginan mereka; sekalipun harus mengorbankan hak dan kepentingan pihak lain. Dan di sinilah letak penyebab timbulnya bencana bagi peradaban umat manusia sebagaimana mulai nampak sekarang terutama diakibatkan oleh penguasa produk teknologi canggih yang tidak taat terhadap nilai-nilai luhur dari ajaran agama yang diyakini sebagai tuntunan yang benar.

Sepanjang masa keberadaan umat manusia, baik sebelum dan di zaman klasik, zaman pertengahan, maupun di era modern seperti sekarang, agama tetap dibutuhkan demi menjaga keselamatan penghuni jagat raya terutama manusia sebagai pelaku budaya. Paling tidak ada 7 (tujuh) nilai dasar yang diperjuangkan oleh agama untuk diwujudkan dalam kehidupan modern sekarang dan ke depan agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan.

Ketujuh nilai dasar tersebut, masing-masing adalah : (1) Jujur ; (2) Tanggung jawab; (3) Visioner; (4) Disiplin; (5) Kerjasama; (6) Adil; dan (7) Peduli.³

Agama harus diberi fungsi sebagai ”lembaga konsultasi” oleh pelaku budaya dengan jalan menempatkan agama sebagai sumber petunjuk yang memiliki nilai-nilai universal dan agung karena ajarannya diyakini sebagai sumber zat yang Maha Transenden.

B. Konflik

1. Pengertian Konflik

Istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata konflik kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Istilah konflik saat ini juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi. Istilah “conflict” menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.⁴

³ Ary Ginanjar Agustian, *The ESQ Way 165*, (Jakarta: ESQ Leadership Centre, 2007), hal. 19.

⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Helly P. Soetjipto (Penerjemah) Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 9.

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁵ Konflik sosial dapat diartikan dalam dua hal, yakni yang pertama adalah perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial, sedangkan yang kedua adalah pertikaian yang terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan.⁶

Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik. Marx mengantisipasi bahwa kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan. Bentrokan kepentingan-kepentingan ekonomis akan berakhir di dalam sebuah bentuk masyarakat tanpa kelas, bebas konflik dan kreatif. Penyebab ekonomis dari konflik sosial dan cara-cara konflik itu dibendung dan ditekan oleh kelas yang berkuasa di dalam setiap

⁵ “..Keputusan kami dipengaruhi oleh fakta bahwa kami adalah ahli psikolog sosial yang terbiasa berfikir dalam kerangka dampak kondisi mental terhadap perilaku sosial...” Lengkapnya lihat Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik.....*, hal. 9-10.

⁶ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Haris Munandar (Penerjemah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 155-156.

masyarakat sebelum meledak menjadi bentuk-bentuk kehidupan sosial yang baru.⁷

2. Jenis Konflik

Para ilmuwan sosial sampai saat ini masih mencari penyebab secara umum, pola-pola eskalasinya, cara penyelesaian dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Antara satu jenis konflik dengan konflik yang lainnya selalu ada kemiripan, meskipun variasi juga selalu ada. Ada tiga varian terpenting yang saling terkait, yakni karakter pihak yang berkonflik, hakekat tujuan serta sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri.⁸

Pertama, pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kekompakannya. Pada titik ekstrim yang satu, kita melihat pemerintah, serikat buruh dan berbagai entitas lainnya yang memiliki peraturan keanggotaan dan pedoman tindakan yang ketat. Pada titik ekstrim lainnya kita melihat entitas-entitas longgar yang bersifat abstrak seperti kelas sosial atau pendukung ideologi tertentu yang kohesivitasnya sulit dilihat ataupun dibuktikan. Hampir setiap konflik sosial melibatkan banyak pihak yang antara satu dengan yang lain terkadang tumpang tindih.

⁷ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, F. Budi Hadiman (Penerjemah), (Yogyakarta: Kanisius, 2001) Cetakan ke-6, hal. 134.

⁸ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi....* hal. 156-157

Misalnya saja pemerintah sering berbicara mengatasnamakan pemerintah sendiri, negara secara keseluruhan, rakyat, ideology, fraksi partai politik tertentu, bahkan kelas sosial tertentu. Setiap pertanyaan diarahkan pada pihak yang berbeda-beda dan inilah yang membuat karakter konflik begitu kompleks.

Kedua, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan, dan tujuan itu sendiri juga bervariasi mulai dari penguasaan tanah, perebutan uang, atau sekedar pertikaian atas hal-hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak-pihak tertentu. Konflik yang terjadi karena memperebutkan sesuatu yang mengandung nilai materi disebut sebagai konflik konsensual, sedangkan memperebutkan sesuatu yang dianggap bernilai disebut dissensual. Hampir setiap konflik bisa disebut konflik konsensual sekaligus dissensual, karena setiap tujuan atau kepentingan yang terlibat di dalamnya memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap pihak yang terlibat, mulai dari hal-hal yang menyangkut kepentingan remeh sampai dengan hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Ketiga, konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara itu sendiri sangat bervariasi mulai dari pemaksaan terang-terangan, ancaman, sampai dengan bujukan [misalnya bujukan dalam partai-partai politik dalam pemilihan umum]. Bila konflik yang sama terus berulang-ulang, maka konflik itu akan terus melembaga dan cara-caranya

pun dilembagakan pula. Contohnya adalah konflik antara pengusaha dan buruh yang sudah berlangsung sejak abad 19 [Dahrendorf, 1959].

Disamping aspek teoritisnya, nilai orientasi orang-orang yang terlibat juga penting dalam studi konflik. Ada sebagian teorisi yang mencoba memahami konflik sosial dari perspektif partisan [ikut terlibat secara langsung], dan ia mencoba mempelajari bagaimana salah satu pihak berjuang memenuhi kepentingannya. Ada pula mereka yang berusaha meminimalkan kekerasan dan mencari cara-cara alternatif untuk mempertahankan diri sekaligus mencapai tujuannya tanpa harus menumpahkan darah. Yang paling menarik adalah ada pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri.

Studi tentang konflik sosial juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dimana peneliti berada, dan juga kecenderungan intelektual dan pengaruh paradigma yang berlaku. Sebagai contoh, di Amerika Serikat selama 1950-an konflik dipandang sebagai sesuatu yang tidak realistis dan tidak bisa diandalkan untuk mencapai tujuan, baik itu di tingkat individual maupun sosial. Sedangkan akhir 1960-an dan 1970-an konflik justru dipandang sebagai wahana penting dalam mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan. Berikutnya pada 1980-an, konflik dipandang sebagai suatu hal yang wajar akibat adanya perbedaan kepentingan.

3. Penyebab Konflik Sosial

Pada umumnya para ilmuwan sosial berpendapat bahwa sumber konflik sosial adalah hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi; mereka jarang menyoroti sikap dasar biologis manusia sebagai penyebabnya. Berbagai kondisi dan proses sosial yang dihadapi salah satu pihak yang terlibat dalam suatu konflik biasanya sudah cukup untuk mengungkap terjadinya pertentangan.⁹

Kebanyakan teorisi konflik berpendapat bahwa konflik bersumber dari perebutan atas sesuatu hal yang terbatas, namun ada pula yang melihatnya sebagai akibat ketimpangan. Banyak konflik yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan ataupun perbedaan nilai-nilai. Kemandirian dan persamaan norma acapkali secara efektif mencegah konflik jenis ini. System yang melingkupi tindakan pihak-pihak yang akan bertikai juga akan mempegaruhi ada atau tidaknya konflik. Keberadaan sarana-sarana yang sah untuk mengelola konflik biasanya dapat mengurangi kecenderungan pecahnya konflik. Para teorisi fungsional menekankan pentingnya integrasi nasional dan karakter konsensual dari sistem-sistem sosial, karena mereka percaya banyak konflik sesungguhnya diakibatkan oleh perubahan sosial yang tidak merata. Konflik seperti itu cenderung memicu perilaku yang oleh para analis lebih bersifat ekspresif ketimbang instrumental.¹⁰

⁹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi*, hal. 157

¹⁰ Ibid

Kesadaran bagi pihak-pihak yang bertikai juga menentukan keberadaan konflik. Sejumlah analis berpendapat bahwa kesadaran seperti itu muncul dari deprivasi absolut, namun adapula yang menganggap deprivasi relative lebih penting. Biasanya, keyakinan anggota-anggota kelompok tertentu bahwa mereka dapat memperbaiki kondisi *status quo*, sedangkan kelompok lain tidak menganggap demikian, adalah cikal bakal konflik. Kekuatan dan kohesi kelompok dominan juga turut menentukan ada tidaknya konflik yang pada hakikatnya merupakan tentangan terhadap dominasi itu. Kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan harus berusaha memobilisasikan kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Ikatan-ikatan antar-personal sangat menunjang mobilisasi, dan hal itu pula yang dimanfaatkan oleh para pemimpin kharismatik, atau para ideologi.¹¹

4. Penyelesaian konflik

Sebagian besar studi mengenai konflik sosial berfokus pada munculnya perilaku koersif dan eskalasinya. Namun belakangan ini, minat terhadap de-eskalasi dan penyelesaian konflik juga berkembang. Sarana-sarana pemaksaan atau koersif yang digunakan dalam konflik sangat bervariasi intensitas dan jangkauannya. Elemen-elemen non-koersif juga sering digunakan, misalnya berupa persuasi/bujukan atau penyodoran sanksi positif seperti janji-janji berupa keuntungan tertentu bagi pihak

¹¹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi....* hal 158

yang bertikai. Lebih lanjut eskalasi dan de-eskalasi itu dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan internal dalam setiap kelompok yang bertikai, interaksi antara mereka, dan tindakan para pelaku yang tidak terlibat dalam konflik sejak awal.

Pertama-tama, faktor-faktor internal mencakup aneka proses psikologis-sosial dan perkembangan organisasional yang selanjutnya dapat mengembangkan komitmen untuk mengakhiri konflik. Setiap sub-unit yang terlibat dalam suatu konflik bisa saja memperoleh tambahan kekuasaan, status atau kekuatan ekonomi dari pertikaian, namun kelompok-kelompok yang kehilangan kekuasaan atau sumberdaya dari konflik itu juga tidak kalah banyaknya, dan mereka inilah yang biasanya sedikit demi sedikit kehilangan komitmennya untuk meneruskan konflik.

Kedua, jika interaksi antara pihak-pihak yang bertikai tidak bersifat provokatif atau intimidatif, maka proses de-eskalasi pun berlangsung yang selanjutnya dapat berpuncak pada konsiliasi atau pengakhiran konflik. Kondisi-kondisi disekitar konflik tentu saja mempengaruhi pola-pola pelaksanaan konflik itu sendiri.

Ketiga, pihak-pihak yang tidak terlibat konflik sejak awal dapat mempengaruhi kelangsungan konflik itu dengan bergabung kedalamnya untuk mengejar kepentingannya sendiri, atau bisa juga bertindak sedemikian rupa sebagai pengimbang sehingga dapat mengurangi laju konflik atau bahkan menghentikannya. Terhentinya suatu konflik bisa jadi

merupakan suatu awalan bagi konflik yang lain. Pemahaman mengenai hakikat penyelesaian konflik merupakan aspek penting dalam studi mengenai konflik-konflik sosial.

Pihak-pihak yang berkonflik biasanya secara berkala mengevaluasi hasil yang mereka dapat, baik itu berupa kekalahan, kemenangan maupun kerugian. Jika semua pihak sama-sama merugi, maka ada kemungkinan konflik itu akan segera terhenti. Jika pihak-pihak yang terlibat justru memperoleh keuntungan, karena adanya karakter yang saling terkait dalam konflik itu, maka bisa jadi konflik akan berkepanjangan. Jangka panjang dan konsekuensi-konsekuensi tak langsung dari konflik sosial itu juga penting untuk diamati. Para fungsionalis melihat fungsi konflik sosial itu bukan saja sebagai ajang pertandingan antar-pihak yang terlibat langsung, namun bagi sistem yang lebih luas. Para analis yang menggunakan perspektif konflik tidak saja melihat konflik sebagai suatu endemik, namun juga sebagai pilihan cara untuk menciptakan perubahan.¹²

C. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

“Pertambangan” yang berasal dari kata dasar tambang mempunyai arti lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali

¹² Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi.....* 158-159

(mengambil) hasil dari dalam bumi. Pertambangan mempunyai arti sebagai urusan (pekerjaan) yang berkenaan dengan tambang. Proses, perbuatan, atau cara untuk mendapatkan bahan-bahan tambang disebut pula dengan penambangan.¹³ Arti penambangan adalah suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja (penambang) untuk mendapatkan benda-benda yang terkandung di dalam perut bumi yang berupa barang-barang tambang.

Tambang didefinisikan sebagai penggalian ke bawah permukaan tanah dengan maksud pengambilan bahan galian yang mempunyai arti ekonomis.¹⁴ Bahan galian itu dapat berupa bijih yang akan menghasilkan berbagai macam logam, atau berbagai macam bahan non logam, seperti belerang, garam, fosfat, asbes, gips, minyak dan gas bumi, batubara, batu, pasir, kerikil, dan tanah lempung.

Dalam Undang-Undang No. 04 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) mengartikan bahwa “pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 891.

¹⁴ Irwan, M. “Tambang,” dalam Anton M. Moeliono (ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet. Ke-XVI, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991, hlm 54.

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Bahan tambang didefinisikan sebagai barang yang disimpan oleh Allah dalam perut bumi, baik yang berada dalam tanah atau di dasar laut agar dimanfaatkan oleh manusia, meliputi biji besi, tembaga minyak bumi, emas, perak, garam, dan barang lainnya termasuk biji timah.¹⁵

2. Dasar Hukumnya

Dalam Undang-Undang Pertambangan No. 37 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967 pasal 3, bahan galian di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut:

- a. Bahan galian Golongan A (bahan galian strategis) adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, timah putih, besi, dan nikel. Bahan galian ini sepenuhnya dikuasai oleh negara.
- b. Bahan golongan B (bahan galian vital) adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat, misalnya emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa. Bahan galian ini dapat diusahakan oleh

¹⁵ Abdullah dan Abdul Husaini at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, hlm. 72.

badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.

- c. Bahan galian golongan C (tidak termasuk strategis dan vital) adalah bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat, misalnya batu gamping, marmer, batu asbak, pasir.¹⁶

Penggolongan tersebut bertitik tolak dari kedudukan masing-masing bahan galian yang bersangkutan di dalam undang-undang. Dalam undang-undang ataupun peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait disebutkan bahwa apabila pengusahanya perseorangan, maka harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Rakyat setempat, anggota suatu masyarakat hukum tertentu diperkenankan melakukan penambangan bahan galian golongan manapun juga, tetapi dilaksanakan secara kecil-kecilan dalam usaha untuk memenuhi kehidupannya, dilakukan dengan peralatan sederhana dan dikategorikan sebagai pertambangan rakyat.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: ¹⁷

¹⁶ UU Pertambangan No. 37 Tahun 1960 dan UU Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967.

¹⁷ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

- i. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pelayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- ii. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- iii. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- iv. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- v. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Islam pertambangan diperbolehkan berdasarkan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam al-Qur'an disebutkan:

.... يَٰعِلْمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا...¹⁸.

Ayat di atas menganjurkan manusia melakukan eksplorasi sumber kekayaan alam. Kata-kata “apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya,” memberi petunjuk bahwa ada sumber kekayaan alam yang terpendam di dalam bumi yang perlu diteliti dan berguna bagi peradaban dan kemajuan umat manusia.¹⁹

Allah menciptakan besi yang dapat dimanfaatkan manusia guna membuat alat-alat pertahanan, alat industri, dan keperluan rumah tangga mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam satu ayat:

...وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...²⁰

Ayat di atas menghendaki manusia untuk memanfaatkan dan melakukan eksplorasi atau eksplorasi terhadap barang tersebut.

3. Jenis-jenis Pertambangan

Petambangan dapat berupa:

¹⁸ Al Hadid (57): 4, artinya,” ... apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya....”

¹⁹ Hamzah Ya'qub, Etos Kerja Islami, Cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 47.

²⁰ Al-Hadid (57): 25, artinya,” ... Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia....”

- i. Pertambangan terbuka, yaitu penggalian bahan tambang yang dilakukan pada tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan udara luar. Penambangan model ini dilakukan terhadap bahan galian yang terletak pada permukaan tanah, atau sedikit terbenam di dalam tanah. Dalam jenis ini, misalnya *alluvial hidraulik*, yaitu penambangan dengan menggunakan penyemprotan air bertekanan tinggi terhadap tebing sungai yang tersusun dari pasir untuk menggalinya.²¹
- ii. Pertambangan bawah tanah, yaitu penambangan yang dilakukan di bawah permukaan tanah. Penambangan ini dilakukan hampir tanpa mempedulikan keadaan permukaan tanah, kecuali dalam hal pembuangan sisa-sisa yang diangkut keluar dan tidak terpakai. Masalah utama penambangan ini adalah ventilasi dan penerangan, serta berbagai bahaya penambangan.
- iii. Pertambangan bawah laut, yaitu penambangan yang dilakukan pada atau di atas dasar laut. Penambangan ini dapat berupa penambangan bahan yang terlarut dalam air

²¹ Irwan, M.H., "Tambang," dalam Anton M. Moeliono (ed), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan ke-XVI, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), hal. 55

laut, yang terletak pada dasar samudera, dan yang terdapat dalam batuan di bawah dasar laut.

BAB III

PENAMBANGAN PASIR BESI DI PESISIR KULONPROGO

A. Gambaran Umum Wilayah Penambangan

1. Letak Geografis

Wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan untuk pertambangan pasir besi meliputi 10 desa, antara lain: Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Karangwuni, Garongan, Pleret, Bugel, Karangsewu, dan Banaran. Luas yang direncanakan sekitar 7000 ha di 4 kecamatan, yaitu Galur, Temon, Wates dan Panjatan. Wilayah pesisir Kulon Progo berbatasan dengan Samudera Indonesia pada bagian Selatan, sebelah utara desa Bojong, Kecamatan Panjatan, sebelah barat desa Glagah, dan sebelah timur desa Banaran.¹

2. Sosial Ekonomi, Budaya dan Keagamaan

Mata pencaharian penduduk pesisir Kulon Progo sebagian besar adalah petani. Tanaman yang paling diunggulkan adalah tanaman cabe yang ditanam di atas lahan pasir yang mempunyai kandungan logam besi. Petani yang tinggal di pesisir Kulon Progo ada yang menjadi PNS dan

¹ Bambang Yuniarto, "Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta" *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 5, No. 13, Januari 2009, Bandung: PPPT Mineral dan Batubara, 2009, hal. 1-16.

TNI. Tingkat pendidikan masyarakat Pesisir juga beragam, lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang lulusan perguruan tinggi.

Tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk pesisir masuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini ditandai dengan beberapa rumah yang masih sangat sederhana dan dindingnya terbuat dari bambu. Penunjang transportasi sebagian besar penduduk selain sepeda, mereka sudah memiliki kendaraan bermotor.

Keadaan sosial politik pesisir Kulon Progo sangat dinamis dan demokratis. Hal ini terwujud dalam proses pemilihan kepala daerah yang berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penduduk pesisir Kulon Progo masih mempertahankan tradisi dan budaya, memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong menolong yang tinggi. Kegiatan pelestari budaya antara lain, Nyadran, tirakatan, Ta'jilan, Arisan, Tahlilan, Nisfu Sya'nab, Baritan Genduri dan Bersih Desa. Masyarakat pesisir membangun beberapa pos kamling (pos ronda) untuk pengamanan di setiap pedukuhan. Pos ronda bertujuan untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana untuk berkumpul.

Mayoritas penduduk pesisir Kulon Progo beragama Islam, sehingga kegiatan keagamaan rutin dijalankan seperti yasinan dan tahlilan di beberapa masjid setiap malam jum'at, pengajian ibu-ibu PKK setiap jum'at wage di setiap balai desa pesisir Kulon Progo. Komunikasi antar

umat beragama dilakukan sangat dinamis, terbukti tidak adanya konflik atau perselisihan paham keagamaan. Warga pesisir yang berbeda paham atau agama saling menghargai dan menghormati, saling mendukung kegiatan yang diadakan masing-masing paham keagamaan tersebut.

Daerah pesisir pantai didominasi kaum Nahdliyin yang secara kultur dan hirarki menempatkan Kyai sebagai tokoh dan panutan. Sabda dan seruan Kyai akan jauh lebih didengar, dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Nahdliyin dari pada seruan pemerintah. Dalam konflik penambangan pasir besi disinyalir ada kepentingan politis yang menunggangi agama dan ormas keagamaan sebagai kendaraannya. Misal, kaum Nahdliyin mengikuti basis ormas ke NU dan memiliki afiliasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam sidang DPRD yang membahas proyek Penambangan pasir besi hanya PKB yang tidak sepakat atau menolak penambangan pasir besi.²

Kyai dalam kaum Nahdliyin memiliki kedudukan yang sakral. Kyai menolak penambangan dengan dalil bahwa perbuatan penambangan adalah perbuatan yang merusak lingkungan, karena mengambil dan mengeksploitasi lingkungan. Perbuatan yang merusak adalah haram, maka penambangan pasir besi adalah haram atau dilarang.

² Hasil wawancara dengan Bapak HTN pada 9 September 2012 dan Bapak ARM pada 16 September 2012 di Wates, Kulon Progo.

Konflik yang terjadi di masyarakat pesisir Kulon Progo adalah konflik bersifat horisontal. Contoh, rumah kepala dusun setempat dijadikan tempat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga masyarakat sekitarnya menganggap Kepala Dusun mendukung penambangan. Ada masjid yang sebelumnya kerap digunakan untuk sholat jum'at, saat ini berkurang jamaahnya, karena mayoritas warga memilih beribadah di Musala, yang menggunakan masjid tersebut adalah warga yang pro penambangan. Ada seorang warga yang meninggal dunia, tapi sepi pelayat, karena para pelayat tidak diperkenankan untuk melayat oleh kelompok warga yang berseberangan dengan almarhum.

B. Wacana Penambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

Penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo sudah lama direncanakan yaitu sejak zaman pemerintahan Hamengkubuwono yang ke 9 sekitar tahun 1973. Pada awalnya lahan yang akan digunakan sebagai kawasan penambangan pasir besi ini merupakan kawasan yang digunakan para petani Kulonprogo sebagai lahan pertanian. Lahan yang ada di pesisir Kulonprogo sudah sangat subur sejak 40 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan hasil jerih payah para petani dengan pakar para peneliti dari bidang pertanian. Para petani ini menanam dengan pengetahuan kolektif, baik melalui pengalaman mengenai teknologi modern dan juga kearifan lokal saat menentukan musim tanam, merawat tumbuhan sampai memanen lahan.

Lahan pertanian yang subur ini lamban laut mulai terusik dengan adanya penelitian yang membuktikan bahwa pasir yang ada di kawasan pesisir Kulonprogo mengandung pasir besi (Fe,Titanium). Para investor sudah mengetahui kandungan pasir besi di sana sangat bagus maka mereka berinisiatif untuk melakukan penambangan pasir besi. Rencana penambangan pasir besi ini mendapat tindakan penolakan dari masyarakat, selain kerusakan lingkungan penambangan ini pun memiliki muatan politik yang sangat jelas terutama perihal keberpihakan kesultanan terhadap pihak swasta, bahkan banyak kabar yang beredar bahwa perusahaan yang menangani penambangan ini berasal dari kerabat kraton. Kabar ini memang beralasan, jika kita mengacu pada keterkaitan antara PT JMI dengan kesultanan maka kita dapat menemukan benang merah yang mampu untuk menjelaskan kedudukan pihak keraton dengan perusahaan yang menangani penambangan pasir besi di Kulonprogo. Beberapa sumber menjelaskan bahwa perusahaan PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jogja Magasa Mining adalah perusahaan penguasa politik di Provinsi Yogyakarta, yaitu kesultanan dan pakualaman.

Adanya penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo tidak menjadikan semua masyarakat setuju dengan adanya penambangan tersebut. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya penambangan pasir besi di sana maka akan mengganggu dan mengurangi produksi pertanian

mereka yang sudah lama mereka bangun. Penambangan pasir besi di Kulonprogo yang akan membelah kawasan Kulon progo sebesar 3000 hektar atau tepatnya sebesar 2987 hektar ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa, belum lagi masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kulonprogo di sekitar daerah penambangan.

Dampak yang ditimbulkan akibat penambangan itu sangat banyak antara lain:

1. Kerusakan ekosistem pesisir dan gumuk pasir
2. Penggusuran lahan hortikultura dan pemukiman
3. Penghapusan lapangan kerja masyarakat yang sebagian besar sebagai petani
4. Menghilangkan fungsi ekologis (yang berfungsi sebagai benteng terjadinya ancaman tsunami),
5. Penggusuran lahan pertanian dan pemukiman masyarakat setempat.

Penyebab utama konflik yang terjadi di kawasan pesisir kulon progo selain karena membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan juga karena diberlakukannya Undang Undang Tata Ruang kabupaten Kulon progo dimana kawasan pesisir diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan. Selain itu konflik yang masih terus berlangsung ini juga disebabkan karena menurut UU No 5 tahun 1960, bahwasanya masyarakat berhak mengelola lahan pesisir karena mereka memiliki sertifikat sah namun pada kenyataannya itu semua tidak seperti

adanya. Selain itu adanya Kepentingan kapitalisme global dan ketidakadilan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Konflik sulit diselesaikan karena adanya ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta terhadap peran dan kepentingan masyarakat. Ketiadaan alternatif kebijakan dimana aspirasi masyarakat untuk merundingkan alternative kebijakan selain pertambangan, agar terbentuk pengelolaan sumberdaya alam yang kolaboratif, selalu menemui jalan buntu karena pemerintah dan korporasi menghindar dan meneruskan proses legalisasi pertambangan. Bukan hanya itu, masyarakat disana mempunyai pemikiran bahwa belum tentu penghasilan sebagai buruh penambang pasir besi itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai petani sebab hasil produksi pertanian mereka jauh lebih tinggi. Selain itu penambangan itu tidak selamanya akan bertahan lama sebab tambang itu sewaktu waktu bisa saja mati karena membutuhkan waktu untuk reklamasi³ lahan atau pemulihan lahan kembali. Reklamasi lahan itu membutuhkan waktu yg sangat lama utk kmbali menjadi lahan yang subur.

1. Manfaat Besi

³ Reklamasi adalah usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misal dengan cara menguruk daerah rawa-rawa) , atau pengurukan (tanah); <http://artikata.com/arti-347383-reklamasi.html>. akses 19 November 2012

Penelitian astronomi modern menemukan bahwa besi yang ada di perut bumi berasal dari bintang-bintang di luar angkasa. Besi merupakan unsur logam yang paling melimpah di bumi.⁴ Besi memiliki bentuk (struktur) yang unik, terbentuk dari bintang yang lebih besar dari matahari, sehingga ketika suhunya naik dan meledak, pecahannya akan berhamburan ke seluruh alam semesta, kemudian tertarik oleh gravitasi bumi, dan tertanam selama jutaan tahun lamanya di bumi. Allah menciptakan besi dan kemudian menurunkannya ke bumi untuk dapat diolah serta dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan.⁵ Besi yang terkandung dalam perut bumi, sejak lama menjadi material pokok yang digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Pada masa perang dulu, besi menjadi bahan baku paling penting dalam membuat peralatan tempur seperti pedang, perisai dan baju besi. Salah satu sumber mineral yang memiliki arti penting dalam sejarah teknologi Islam adalah besi dan baja.

Dalam Alquran surat Al Hadiid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hal ini ditegaskan dalam ayat:

⁴ Ahli Geologi menyingkap bahwa 35% kandungan bumi adalah besi. Lengkapnya lihat di: <http://www.suaramedia.com/artikel/kumpulan-artikel/39174-mukjizat-sebuah-besi-dalam-surat-al-hadid.html> akses 19 November 2012

⁵ Besi merupakan unsur logam yang dijadikan sebuah surat dalam Al Qur'an, yaitu Surat Al Hadid yang artinya "besi".

... وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ...⁶

Dalam ayat ini, kata “anzalnaa” memiliki arti “kami turunkan” digunakan untuk menunjuk besi. Apabila diartikan secara kiasan kata “anzalnaa” menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia.

Apabila mengartikan kata itu secara harfiah, yakni “secara bendawi diturunkan dari langit”, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit. Beberapa ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran ayat itu. Partikel besi tidak berasal dari bumi melainkan berasal dari benda-benda luar angkasa.

Paling tidak, terdapat sembilan ayat dalam Alquran yang membahas dan menjelaskan tentang besi. Salah satunya, “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah

⁶ Al-Hadiid (57): 25, “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami turunkan (anzalnaa) besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*”

Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).” (QS An-Nahl: ayat 81)

2. Penambangan, Pengolahan Pasir Besi dan Pengelolaan Lingkungan

Pro dan Kontra rencana penambangan dan pengolahan pasir besi untuk menghasilkan *pig iron* di pesisir Selatan Kulon Progo terus bergulir.⁷ Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai tidak ada transparansi yang jelas dari pihak Pemkab Kulon Progo maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam penambangan untuk menghasilkan *pig iron*.⁸ Penambangan pasir besi di berbagai daerah, misalnya di Purworejo meninggalkan kerusakan lingkungan. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan petani, sehingga petani menolak penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Para petani merasa sudah mampu mengembangkan lahan pertanian yang dulunya kering kerontang menjadi hijau dan subur. Kini mereka menyandarkan hidup dari mengolah lahan pantai tersebut, sehingga munculnya penambangan pasir besi di pesisir pantai membuat mereka khawatir.

⁷ Hasil diskusi yang diadakan pada tanggal 26 September 2012 bertempat di Selasar Fakultas Geografi UGM ini membahas tentang penambangan pasir besi yang ada di pesisir Kulon Progo. Diskusi ini mengangkat tema “pro-kontra tambang pasir besi Kulon Progo” dengan pembicara Anggit Priatmojo, S.Si dan Purnama Ayu Rizky.

⁸ Pig Iron adalah produk setengah jadi dari peleburan besi. http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_iron. akses 30 Oktober 2012

Sejak awal WALHI menolak wacana penambangan pasir besi tersebut. WALHI memprediksi biaya sosial dan ekonomi seandainya penambangan tetap dilaksanakan. Masyarakat tidak hanya butuh ganti rugi akan tetapi butuh jaminan keberlangsungan hidup, sebab ganti rugi hanya berlangsung sesaat, sedang keberlangsungan hidup berlangsung sampai anak cucu.⁹ Awalnya kegiatan penambangan pasir besi akan dilakukan PT. Jogja Magasa Mining (PT. JMM) berizin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bupati Kulon Progo. Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PT Krakatau Steel (PT. KS) dan PT. JMM. Indo Mines Ltd. merupakan perusahaan tambang dari Australia, yang akan membangun pabrik untuk mengolah pasir besi, dengan nilai investasi 600 juta dollar AS. Adanya unsur penanaman modal asing (PMA), maka KP Eksplorasi Bupati Kulon Progo tersebut ditingkatkan menjadi pertambangan.

Status tanah pesisir pantai selatan Kulon Progo terbagi dua, kawasan pantai sebelah timur sungai Progo ke arah Kabupaten Bantul merupakan *Sultan Ground*, sedangkan kawasan pantai sebelah barat Sungai Progo ke arah Kutoarjo merupakan *Pakualaman Ground*.¹⁰ *Pakualaman Ground* sejak sebelum tahun 2000 dibudidayakan oleh masyarakat pantai sebagai lahan pertanian. Masyarakat mendapat bantuan

⁹ Wacana Penambangan Pasir Besi di Kulon Progo” <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/01/24/48812/walhi-tetap-menolak-penambangan-pasir-besi-kulon-progo>. Akses 29 Oktober 2012

¹⁰ BPS Kulon Progo, 2007)

dan dukungan proyek pengembangan pertanian kawasan pantai, sehingga secara signifikan lahan pertanian tersebut mampu ditingkatkan produktivitasnya. Masyarakat kawasan pantai ini banyak mengalami kemajuan, sehingga muncul perlawanan dari beberapa kelompok tani, seperti Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Kelompok Tani Karangwuni, Kelompok Tani Garongan, Wates.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PT JMM (Indo Mines Ltd. dan PT. KS), baik sosialisasi ke masyarakat langsung, atau melalui orang-orang kunci (formal dan non formal) masyarakat pantai, maupun sosialisasi yang dilakukan melalui dinas dan di hadapan DPRD Kabupaten Kulon Progo, mengakibatkan kelompok pro dan kontra terhadap kehadiran proyek tersebut mulai terpecah. Masyarakat dan kelompok tani Desa Banaran yang dulunya menolak kini menjadi mendukung setelah mendapat kepastian mengenai lahan garapannya dan manfaat dari proyek tersebut.

Pada akhir 2006 PT JMM telah menyelesaikan aktivitas eksplorasi pasir besi di Kulon Progo pada area sekitar 2 x 22 km. Warga di daerah eksplorasi tidak ada yang menolak, karena semua kewajiban yang berupa ganti rugi dan lain-lain diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hasil eksplorasi menyimpulkan bahwa total cadangan pasir besi Kulon Progo sekitar 605 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 10.8% dan proporsi tertinggi cadangan pasir besi pada kedalaman 608 meter dari

permukaan dengan total cadangan sekitar 273 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 14,2%.¹¹

Areal penambangan berada pada jarak sekitar 200 meter dari garis pantai ke arah darat, dan akan dibuatkan 'barrier' atau tanggul dan ditanami pohon cemara udang, sebagai pencegah abrasi. Setiap tahun akan dilakukan penambangan pada areal sejauh 200-400 m dari bibir pantai pada batas pasang tertinggi dengan kedalaman sekitar 6 m. Pasir besi yang digali akan diangkat dan dimasukkan dalam proses pencucian dan penyaringan, sehingga akan diperoleh 20% pre-konsentrat mineral besi. Sisanya sebanyak 80% berupa pasir halus akan dikembalikan ke lokasi galian tambang sebagai bagian dari proses reklamasi. Pre-konsentrat mineral besi (20%) akan diangkat dan kemudian diproses di pabrik konsentrat, dengan alat pemisah magnetik, menghasilkan mineral besi/logam yang beratnya hanya 10% dari total galian pasir besi dan sisanya akan dikembalikan lagi ke lokasi galian tambang sebagai bahan reklamasi.

Pada tahun kedua setelah penambangan, daerah bekas area penambangan akan dapat ditanami kembali dengan produk agrikultur yang lebih bernilai ekonomis. Tejoyuwono menyatakan bahwa area lahar pasir

¹¹ Bambang Yuniarto, "Kajian Permasalahan Lingkungan.... hal 1-16

besi bukan lahan yang bernilai pertanian.¹² Pasir besi yang dihilangkan kandungan logamnya, kemudian ditambah dengan tanah dan pupuk, maka daerah reklamasi akan menjadi lebih subur dan bernilai pertanian.

C. Pro dan Kontra Penambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

Adanya penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo menimbulkan konflik antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra. Peneliti telah mewawancari kedua pihak yang masing-masing diwakili dua informan.

1. Pihak yang Mendukung Penambangan¹³

Pada awal 2006 semua warga di sepanjang pesisir di tiga kecamatan Wates, Panjatan dan Galur menolak penambangan proyek pasir besi. Penolakan tersebut disebabkan:

- a. Kekhawatiran akan tanah yang tidak dapat subur lagi dan merusak lingkungan.
- b. Hilangnya mata pencaharian mereka sebagai petani, karena mereka adalah Petani Lahan Pantai yang lahannya akan dijadikan penambangan.

¹² Tedjoyuwono Notohadiprawiro, Azas-azas Pedologi (Text book bagian I), Fak. Pertanian UGM Yogyakarta, 1978

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak HTN (42 tahun) pada 9 September 2012 dan Bapak ARM (40 tahun) pada 16 September 2012 di Wates. Keduanya adalah PNS di Pemerintah Daerah Kulon Progo.

- c. Sosialisasi dan informasi yang diterima masyarakat hanya sebagian (tidak utuh) terutama yang berkaitan dengan tujuan penambangan berorientasi ramah lingkungan.¹⁴
- d. Seiring berjalannya waktu dengan adanya pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah dan PT JMM¹⁵ dan sosialisasi terhadap manfaat yang akan didapat warga baik secara ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka sikap warga terpecah. Bila dulu ada yang menolak, maka sekarang ada yang mendukung.

Pihak yang mendukung beranggapan bahwa pemerintah harus bersikap jujur dan transparan terkait pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus memberikan bukti bahwa pertambangan ini memberi kemaslahatan umat karena ini menyangkut kepentingan bersama dengan tujuan kemanfaatan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Pemerintah memberi bukti bahwa petani berhak memperoleh kompensasi

¹⁴ HTN dan ARM berpendapat bahwa setelah warga pesisir diberi penjelasan bila tanah yang telah ditambang akan direklamasi dan masyarakat akan tetap bertani seperti biasa. Warga ada yang mendukung dan menolak pertambangan. Warga yang mendukung program penambangan karena mendapat sosialisasi yang menyeluruh dan lengkap, termasuk manfaat yang akan didapat warga di bidang ekonomi, sarana dan prasarana. Warga yang menolak proyek pertambangan karena kurang mendapat sosialisasi dan informasi secara menyeluruh terhadap penambangan pasir besi.

¹⁵ PT JMI (Jogja Magasa Iron) adalah kontraktor yang diberi izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi oleh Bupati Kulon Progo. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT KS (Krakatau Steel), Indo Mines Ltd. dan PT JMM (Jogja Magasa Mining). Indo Mines Ltd adalah perusahaan tambang dari Australia yang akan membangun pabrik untuk mengolah pasir besi.

atas lahannya yang dipakai untuk penambangan, pendapatan warga di sekitar penambangan akan meningkat, dan kemajuan di berbagai sektor.

Penambangan pasir pantai akan memberi dampak positif dan negatif. Hal yang wajib dipertimbangkan adalah skala prioritas atau kepentingan penambangan, manakah yang lebih besar dampaknya, positif atau negatif. Bila pasir yang diambil besinya kemudian direklamasi, dan tanahnya akan semakin subur, maka akan lebih banyak dampak positifnya. Situasi dan kondisi masyarakat saat ini cukup kondusif, karena kegiatan penambangan dihentikan, sehingga masyarakat tetap bertani seperti biasanya.

Pengajuan kontrak karya antara PT JMM dengan pemerintah daerah disetujui pada 4 November 2012, sehingga menimbulkan benturan antara PT JMM dengan masyarakat yang menolak penambangan. Penangkapan terhadap TKJ, seorang aktivis PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) tidak menyurutkan sebagian masyarakat menolak tambang pasir besi itu. Konflik horisontal ini belum mengarah pada konflik fisik, tetapi dampaknya adalah lunturnya kerukunan hidup antar warga setempat. Misalnya, kelompok yang mendukung penambangan kerap berkumpul dan memisahkan diri dari yang kontra.

Ulama dan tokoh masyarakat berusaha untuk mengurangi atau mencegah konflik dengan tidak menyinggung masalah penambangan, karena masalah tersebut adalah masalah yang sensitif. Para ulama dan

tokoh masyarakat saat ini selalu membela kepentingan kelompoknya masing-masing. Dalam kegiatan beribadah, seperti shalat Ied, masyarakat yang pro dan kontra selalu bersama, tetapi terkait pro dan kontra penambangan pendirian mereka tetap tidak dapat disatukan, karna mempunyai konsep atau prinsip yang berbeda.

Solusi yang dianjurkan adalah semua pihak terkait harus duduk bersama dan mencari kesepakatan bersama. Satu hal lagi perlunya dialog peradaban yang berkelanjutan untuk mencari solusi bersama. Saran untuk berbagai pihak, antara lain:

- i. Pemerintah harus arif bijaksana kepada rakyat dengan cara membuktikan janjinya, bahwa tidak ada eksploitasi sepihak dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.
- ii. Tokoh masyarakat yang menolak juga harus realistis dalam melakukan tuntutan karena ada kepentingan yang lebih besar atas nama kepentingan nasional yang dalam Islam dikenal “fiqh prioritas”¹⁶ bahwa kemaslahatan umum lebih utama dari pada kemaslahatan kelompok.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas*, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Robbani Press, 1996), hal 17. Atau lihat buku Qardhawi, *Fikih Prioritas*, Moh. Nurhakim (Penerjemah), judul asli: *Fii Fiqhil-Aulawiyyaati*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hal. Vi. Qardhawi dalam buku ini memberikan solusi terhadap tiadanya keseimbangan –dari sudut pandang agama– dalam memberikan penilaian terhadap perkara-perkara, pemikiran dan perbuatan; mendahulukan sebagian perkara atas sebagian yang lain; mana perkara yang perlu didahulukan, dan mana pula perkara yang perlu diakhirkan; perkara

- iii. Pihak penambang harus jujur dan bertanggungjawab dalam melakukan penambangan, jangan sampai ada masyarakat yang dieksploitasi. Pihak penambang harus dapat memberi dan menunjukkan manfaat dulu kepada masyarakat sehingga masyarakatlah yang akan menilai.
- iv. Masyarakat harus dijauhkan dari berbagai pengaruh kepentingan baik kepentingan kelompok, politik maupun organisasi.¹⁷

Status tanah yang dijadikan lahan pasir pantai yang membentang di tiga Kecamatan: Wates, Galur dan Panjatan, sesungguhnya bukan tanah hak milik warga pesisir pantai, tetapi Sultan Ground dan Paku Alam

mana yang harus diletakkan dalam urutan pertama, dan perkara mana yang mesti ditempatkan pada urutan ke tujuh puluh pada anak tangga perintah Tuhan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam hal mengeluarkan dana tahunan untuk ibadah haji atau umroh, orang-orang kaya berlomba-lomba, tetapi jika diminta untuk memerangi orang-orang Yahudi di Palestina; membantu kaum Muslimin di Serbia, Bosnia, Herzegovina; atau untuk menghadapi gerakan Kristenisasi di Bangladesh, atau negara-negara Afrika dan negara-negara Asia Tenggara lainnya; atau untuk membangun pusat-pusat Islam atau mencetak kader da'wah yang memiliki spesialisasi di berbagai bidang kehidupan; atau untuk mencetak, menerjemahkan, dan menerbitkan buku-buku Islam yang sangat bermanfaat, mereka memalingkan muka, dan menyombongkan diri. Padahal telah ada ketetapan dengan jelas di dalam al-Qur'an bahwa jenis perbuatan perjuangan itu lebih utama daripada jenis perbuatan ibadah haji.

¹⁷ Menurut HTN pada tanggal 9 September 2012, GP Ansor yang mengakui bahwa penambangan tidak selamanya membawa kerusakan, karena justru ada kemanfaatan yang jauh lebih besar, akan tetapi karena sudah menjadi keputusan atau suara di organisasinya, maka secara otomatis GP Ansor juga harus turut menolak. Penguahan Angling Kusumo menjadi Paku Alam di Kulon Progo, jelas bermuatan politis. PPLP memiliki kepentingan berupa kontrak politis, yaitu kompensasi dengan mendapat perlindungan bila Angling Kusumo terpilih menjadi Paku Alam. Perlindungan itu dalam bentuk: proteksi terhadap lahan mereka, dan penolakan terhadap penambangan lahan pasir pantai.

Ground. Status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground dalam UU agraria belum jelas karena bersifat Status Quo. Kepemilikan tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground sesungguhnya berdasarkan pada pengakuan dan keterangan dari perjanjian “giyanti”, yaitu ketika pembagian kekuasaan Mataram oleh Belanda. PPLP hidup dan mengelola lahan bukan di atas tanah mereka, mereka tidak memiliki kepemilikan atas tanah, tetapi dalam hal penolakan seolah-olah itu sebagai tanah miliknya.

2. Pihak yang Menolak Penambangan¹⁸

Pada tahun 2006 perusahaan (PT JMI) ingin melakukan penambangan dengan menggalang masyarakat untuk menyetujuinya, termasuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah sampai ke tingkat desa. Namun karena sosialisasi tidak jelas atau kurang lengkap/menyeluruh, maka tidak semua warga mengikuti sosialisasi. Mayoritas warga Bugel 1 menolak penambangan tersebut, hanya 1% yang mendukung proyek penambangan tersebut.

Alasan penolakan tersebut antara lain:¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak TMR (64 tahun) pada 23 September 2012 di Dusun Bugel, Panjatan dan Bapak ISD (70 tahun) pada 24 September 2012 di Dusun Bugel, Panjatan, Kulon Progo. TMR dan ISD adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian di bibir pantai pasir besi. ISD tercatat sebagai petani pertama yang berhasil bercocok tanam di lahan pasir daerah pantai tersebut.

¹⁹ Hasil wawancara dengan TMR pada 23 September 2012 dan ISD pada 24 September 2012 di dusun Bugel I, Panjatan, Kulon Progo.

- i. Lahan pertanian adalah hak milik pribadi, sehingga warga mempunyai hak (dijual atau disewa) dan kewajiban (membayar pajak) terhadap hak miliknya.
- ii. Belum adanya jaminan bila tanah milik warga yang akan ditambang akan memberikan keuntungan bagi warga. Apakah tanah akan tetap dapat digunakan sebagai lahan pertanian setelah ditambang.
- iii. Penambangan adalah salah satu bentuk penajajahan ekonomi, karena perusahaan, pemerintah dan warga yang mendukung tidak memikirkan keturunannya. Warga di pesisir akan kehilangan mata pencaharian utamanya, karena selama ini warga dapat hidup cukup dari hasil taninya. Misalnya, mereka dapat memenuhi kebutuhan primer (makan, rumah) dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
- iv. Penambangan akan menyebabkan kerusakan alam bahkan bencana bagi penduduk pesisir pantai. Penambangan akan mengeruk pasir, sehingga menyebabkan erosi (air laut naik ke darat). Kerusakan atau bencana alam akan terjadi saat ini atau keturunan kami yang akan mengalaminya. Walau perusahaan berjanji akan menggali sedalam lima meter, tetapi warga mempunyai keyakinan bahwa selama bijih besi masih ada, perusahaan akan tetap mengeruknya. Tokoh

masyarakat pesisir di sini mengikuti hasil penelitian pasir besi dari para peneliti di dalam dan luar negeri.²⁰

- v. Pasir di pesisir pantai memberi manfaat yang sangat besar bagi warga dalam bertani. Pasir dapat menetralsisir air asin menjadi tawar, kemudian dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Bila ada rencana penggantian pasir dengan tanah setelah ditambang, maka alam akan rusak, karena pasir mampu menetralsisir kadar garam air laut, sedang tanah tidak dapat menetralsisir kadar garam.

Salah satu upaya yang dilakukan tokoh masyarakat ataupun ulama setelah ada konflik serius diantara warga, adalah mereka tidak pernah menyinggung masalah pasir besi. Mayoritas warga dusun Bugel menolak penambangan, sehingga tokoh masyarakat atau ulama takut atau tidak berani mengurangi konflik. Tokoh masyarakat dan ulama belum pernah berusaha untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di dusun Bugel.

Kerukunan warga Bugel terganggu bila ada peringatan hari besar, misal: Idul Fitri, Idul Adha, HUT Kemerdekaan RI, Pengajian Akbar. Semua peringatan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kelompok. Bila shalat Idul Fitri atau Idul Adha yang menyelenggarakan pihak yang kontra, maka jamaahnya adalah pihak yang menolak penambangan, sedang pihak yang mendukung menyelenggarakan di

²⁰ Bambang Yuniyanto dalam Jurnal Teknologi ... berpendapat bahwa pasir di pesisir Kulon Progo mengandung bijih besi sampai kedalaman 15 meter.

tempat yang terpisah. Peringatan HUT Kemerdekaan RI tergantung mahasiswa, karena peringatan HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan oleh mahasiswa yang sedang KKN.

Solusi yang ditawarkan pihak yang menolak penambangan agar masyarakat pesisir merasa nyaman, tenteram dan tenang, adalah:

- a. Pihak yang mendukung penambangan “insyaf” bahwa kelak nasib keturunan mereka ditentukan oleh penambangan. Warga pesisir harus satu suara, pihak yang mendukung harus berbalik menolak penambangan.
- b. Masyarakat akan tenang dan rukun seperti semula bila tidak ada rencana penambangan oleh pihak manapun.

D. Manfaat Penambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

Pemerintah Kulon Progo menjelaskan bahwa penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo akan memberi manfaat. Penduduk yang terkena dampak penambangan akan diberi ganti rugi yang layak dan wajar, serta akan dipekerjakan dalam proses penambangan, pembibitan dan penanaman cemara udang, perbaikan mutu tanah dan pemupukan.²¹ Pada tahun kedua, setelah reklamasi pada area penambangan tahun pertama, penduduk/petani dapat memanfaatkan kembali tanah eks penambangan,

²¹ Bambang Yuniarto, “Kajian Permasalahan.....”, hal 12.

dengan tanaman yang lebih bernilai ekonomis. Manfaat dari aspek penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a) Pada area pra-penambangan, lahan mungkin hanya bisa memberi manfaat ekonomis pada 10 petani, tengkulak cabai dan semangka.
- b) Pada masa penambangan akan terserap tenaga kerja minimum 100 tenaga kerja secara langsung dan sekitar 100 secara tidak langsung (sektor angkutan, pemasok, komunikasi dan lainnya).
- c) Pada masa konstruksi pabrik peleburan *pig iron*, yang dimulai pada tahun 2008, setidaknya akan terserap secara langsung 500 tenaga kerja.
- d) Setelah pabrik peleburan besi mulai beroperasi, setidaknya akan dibutuhkan sekitar 2000 tenaga kerja langsung untuk memproduksi 1 juta ton pig iron per tahun.

Dalam jangka panjang diharapkan akan berkembang industri peleburan pig iron yang amat luas, yang akan memberi manfaat ekonomis bagi kemajuan masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Manfaat sosial kemasyarakatan berdasarkan hasil kajian BPS Kabupaten Kulon Progo,²² adalah:

- a. Aspek pertanian: peningkatan kualitas lahan pasca tambang dan pengolahan, peningkatan produksi hasil pertanian, peningkatan nilai tambah usaha sektor pertanian.

²² Hasil kajian sementara BPS Kabupaten Kulon Progo tahun 2008

- b. Aspek pendidikan: program beasiswa, program pengembangan sarana pendidikan, program pengembangan sumber daya manusia.
- c. Aspek kesehatan: pembangunan sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
- d. Aspek budaya: pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
- e. Aspek sosial: pengembangan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan, pembinaan generasi muda, pembinaan dan peningkatan peran perempuan.
- f. Aspek keagamaan: pembangunan sarana prasarana ibadah, pembinaan dan peningkatan kualitas dalam melaksanakan ibadah.
- g. Aspek ekonomi: pembinaan dan pengembangan UMKM, penguatan dan pembinaan kelembagaan ekonomi pedesaan.
- h. Aspek sarana umum: peningkatan infrastruktur di lingkungan kawasan industri.

BAB IV

PERAN AGAMA DALAM MEREDAM KONFLIK PASIR BESI DI PESISIR KULON PROGO

A. Faktor Penyebab Konflik Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

Hasil penelitian atas konflik yang terjadi di pesisir Selatan Kulon Progo, dapat diketahui ada tiga faktor penyebab munculnya konflik yaitu: faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. *Pertama*, faktor ekonomi. Masyarakat di sana mempunyai pemikiran bahwa belum tentu penghasilan sebagai buruh penambang pasir besi itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai petani sebab hasil produksi pertanian mereka jauh lebih tinggi. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya penambangan pasir besi di sana maka akan mengganggu dan mengurangi produksi pertanian mereka yang sudah lama mereka bangun. Contoh lainnya adalah penghapusan lapangan kerja masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kulonprogo di sekitar daerah penambangan. Walaupun demikian, kepentingan yang didasarkan atas pertimbangan untung rugi secara ekonomi serta perebutan pengaruh dan kekuasaan di pesisir Kulon Progo, senantiasa dapat dijumpai dalam setiap konflik. Ini yang menyebabkan konflik di pesisir Kulon Progo menjadi semakin kompleks dan sulit dicari jalan keluarnya. Sampai saat

ini belum ada usaha yang serius untuk mendamaikan konflik antara pihak yang pro dan kontra penambangan.

Kedua, faktor politis. Penambangan ini pun memiliki muatan politis yang sangat jelas terutama prihal keberpihakan kesultanan terhadap pihak swasta, bahkan banyak kabar yang beredar bahwa perusahaan yang menangani penambangan ini berasal dari kerabat kraton. Kabar ini memang beralasan, jika kita mengacu pada keterkaitan antara PT JMI dengan kesultanan maka kita dapat menemukan benang merah yang mampu untuk menjelaskan kedudukan pihak kraton dengan perusahaan yang menangani penambangan pasir besi di Kulonprogo. Berdasarkan dari beberapa sumber bahwa perusahaan PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jogja Magasa Mining adalah perusahaan penguasa politik di Provinsi Yogyakarta, yaitu kesultanan dan pakualaman.

Ketiga, faktor perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. Pihak yang pro mempunyai pandangan bahwa tanah akan semakin subur setelah dieksplorasi kemudian direklamasi, sebaliknya pihak yang kontra mempunyai pandangan bahwa penambangan akan merusak lingkungan. Penambangan pasir besi di Kulonprogo yang akan membelah kawasan Kulon progo sebesar 3000 hektar atau tepatnya sebesar 2987 hektar ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Dampak lain yang ditimbulkan akibat penambangan itu sangat banyak antara lain

kerusakan ekosistem pesisir dan gumpuk pasir, pengusuran lahan hortikultura dan pemukiman, menghilangkan fungsi ekologis (yang berfungsi sebagai benteng terjadinya ancaman tsunami), Pengusuran lahan pertanian dan pemukiman masyarakat setempat.

Penyebab lain konflik yang terjadi di kawasan pesisir kulon progo selain karena membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan juga karena diberlakukannya Undang Undang Tata Ruang kabupaten Kulon progo dimana kawasan pesisir diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan. Selain itu konflik yang masih terus berlangsung ini juga disebabkan karena menurut UU No 5 tahun 1960, bahwasanya masyarakat berhak mengelola lahan pesisir karena mereka memiliki sertifikat sah namun pada kenyataannya itu semua tidak seperti adanya. Selain itu adanya Kepentingan kapitalisme global dan ketidakadilan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Sebelum tahun 2006, masyarakat Kulon Progo dikenal sebagai masyarakat yang guyub, kerukunan terlihat di berbagai sudut desa. Faktanya saat ini masyarakat pesisir Kulon Progo kehilangan kohesi sosial. Kedamaian dan kerukunan di pesisir Kulon Progo terganggu dengan adanya rencana penambangan.

B. Peran Agama Dalam Meredam Konflik Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

Dalam konteks ini, perlu diketengahkan pengertian konflik menurut Lewis Coser. Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkannya, tapi juga memojokkan, merugikan bahkan menghancurkan lawan mereka, baik diantara individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Coser berupaya untuk menempatkan konflik sebagai bagian dari bentuk interaksi sosial yang fundamental. Bagi Coser konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi, atau berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan integrasi. Kepaduan masyarakat Yahudi Israel secara internal, misalnya, ikut berperan dalam berlarut-larutnya konflik dengan bangsa Arab di Timur Tengah. Kemungkinan berakhirnya konflik justru dapat memperburuk ketegangan mendasar di dalam masyarakat Israel. Bahkan, konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain.

Coser ingin menjelaskan bahwa konflik sosial tidak harus merusak sistem atau disfungsional dalam struktur, tetapi juga ada berbagai konsekuensi positif yang dilahirkannya dan justru menguntungkan sistem itu, selain menjelaskan berbagai tingkat atau intensitas konflik itu dari

yang sederhana hingga yang bersifat kekerasan. Coser lebih jauh juga mengembangkan proposisi-proposisi teoritis berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan konflik, seperti bentuk-bentuk konflik dari yang lunak hingga yang mengarah pada kekerasan; durasi konflik; dan fungsi-fungsi konflik. Konflik bisa menjadi lunak atau berbentuk kekerasan tergantung pada level persoalan yang diperebutkan antara kelompok-kelompok yang berkonflik.

Konflik yang disebabkan oleh persoalan yang abstrak, seperti nilai, norma, dan ideologi cenderung mengarah pada bentuk kekerasan dan sulit melahirkan integrasi. Sebaliknya, konflik yang didasarkan pada masalah-masalah yang riil akan melahirkan konsensus. Durasi konflik menjadi panjang atau pendek sangat tergantung pada sejauh mana tujuan-tujuan dari masing-masing kelompok didefinisikan terutama oleh para pemimpin masing-masing. Sedangkan dari segi fungsi, konflik mengandung manfaat sekaligus hambatan bagi keseimbangan atau stabilitas struktur maupun sistem sosial; tergantung sejauh mana intensitas komunikasi dan konformitas para anggota kelompok-kelompok yang berkonflik.

Teori konflik yang dikembangkan Coser sama-sama berangkat dari pembagian masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok super ordinat dan sub ordinat. Kelompok super ordinat menunjuk pada pihak yang mendukung penambangan, karena pihak pendukung diikuti oleh

kaum Nahdliyin, pemerintah dan aparat. Kelompok sub ordinat menunjuk pada pihak yang menolak penambangan, yaitu kelompok petani atau PPLP.

Konflik sulit diselesaikan karena adanya ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta terhadap peran dan kepentingan masyarakat. Ketiadaan alternatif kebijakan dimana aspirasi masyarakat untuk merundingkan alternative kebijakan selain pertambangan, agar terbentuk pengelolaan sumberdaya alam yang kolaboratif, selalu menemui jalan buntu karena pemerintah dan korporasi menghindar dan meneruskan proses legalisasi pertambangan.

Penyelesaian konflik di pesisir Kulon Progo dapat dilakukan dengan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir batin. Tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu mengadakan perubahan orientasi dalam melanjutkan rencana penambangan Rencana penambangan sebaiknya dilaksanakan tidak dalam waktu dekat. Pemerintah membuktikan bahwa reklamasi akan memberi dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Sosialisasi dilakukan secara perlahan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selama ini banyak menjadi panutan masyarakat. Pemerintah mensosialisasikan penambangan tanpa membawa nama perusahaan. Ulama tidak lagi bersikukuh pada interpretasi teks yang mendukung penambangan,

melainkan lebih berorientasi pada konteks ruang dan waktu serta manfaat yang didapat.

Dalam hubungan dengan usaha menciptakan kedamaian masyarakat pesisir, hal ini mengandung arti bahwa dalam mengambil keputusan, tokoh masyarakat dan ulama tidak semata-mata harus berpegang pada suara terbanyak, melainkan patut memperhatikan kepatutan yang berlaku umum.

Agama memberi peluang untuk menempuh beberapa jalan dalam menyelesaikan konflik. *Pertama*, diselesaikan sendiri oleh tokoh masyarakat dan ulama. *Kedua*, dimintakan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Cara paling tradisional dan mudah dimengerti, untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat adalah diselesaikan sendiri oleh masyarakat pesisir dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Cara ini dikatakan murah karena memang tidak membutuhkan biaya dan waktu yang terlalu banyak. Syaratnya, masing-masing pihak yang terlibat konflik benar-benar memahami hakikat obyek yang menjadi sumber pemicu konflik dan masing-masing pihak juga benar-benar bermaksud menciptakan kedamaian bersama.

Masalahnya, sering kali pihak yang terlibat konflik, kurang mengerti hakikat objeknya, sehingga yang muncul sebenarnya adalah pertarungan gengsi. Kalau masing-masing kemudian bertahan pada gengsi dan ketidaktahuannya, maka konflik horisontal di pesisir yang sebenarnya

mudah, menjadi tidak mudah diselesaikan. Kalau cara pertama berakhir buntu, disebabkan karena para pihak bertahan pada keinginannya masing-masing, dapat dipilih cara kedua, dimintakan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam lalu lintas hukum, cara ini dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pihak ketiga yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sebagai penengah menyelesaikan konflik, akan mengambil beberapa langkah awal sebelum memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Pertama-tama akan dijelaskan beberapa terminologi yang berkaitan dengan penyebab munculnya konflik tersebut. Sesudah para pihak memiliki persepsi yang sama, barulah diberikan beberapa pilihan untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya yang menentukan pilihan adalah pihak-pihak yang terlibat konflik. Cara ini memang lebih mudah dari cara pertama, tetapi tidak murah. Perlu disiapkan sejumlah dana untuk pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik sosial yang dimaksud, (honor atau uang jasa), terlepas dari kenyataan apakah yang bersangkutan berhasil menyelesaikan konflik tersebut atau tidak.

Cara paling murah dan relatif mudah untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat pesisir adalah dengan cara menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo atau pemerintah Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya, pihak pemerintah akan berkoordinasi dengan orang yang ahli dan organisasi lainnya yang memiliki kewenangan

dibidang agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi, dengan harapan lebih mudah menemukan penyelesaian yang menyejukkan.

Apabila cara terakhir yang dipilih, berarti segala biaya yang diperlukan (honor atau jasa), dalam usaha menyelesaikan konflik yang dihadapi, menjadi tanggungjawab pihak berwenang. Demikian pula halnya kalau pihak berwenang merasa perlu memanggil pihak tertentu (yang dianggap ahli) untuk memberikan bantuan, maka segala biaya yang diperlukan menjadi tanggungjawab pihak berwenang. Itu sebabnya penyelesaian dengan cara ini dikatakan “murah”.

Pihak-pihak yang terlibat konflik juga tidak perlu pusing memikirkan alternatif penyelesaiannya. Tugas utama yang harus dilaksanakan adalah menyerahkan fakta, data, dan daftar keinginan. Sesudah itu, pihak yang berwenanglah yang memikirkan penyelesaian terbaik bagi para pihak yang terlibat konflik. Sesudah konflik diselesaikan dan keputusan ditetapkan, tidak ada hak bagi pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, untuk mendiskusikan kembali putusan yang telah diambil. Tugas masing-masing pihak hanya satu, melaksanakan keputusan pihak berwenang secara tulus iklas dengan penuh tanggung jawab. Itu sebabnya penyelesaian dengan cara ini dikatakan “mudah”.

Agama berperan menciptakan kerukunan dalam kultur masyarakat yang majemuk. Seperti yang kita semua ketahui bahwa tidaklah mudah

untuk hidup dalam perbedaan. Setiap perbedaan, utamanya perbedaan pendapat yang ada di masyarakat dapat memicu timbulnya perselisihan. Di sinilah posisi agama memainkan perannya yang penting sebagai penegak hukum dan menjaga agar masyarakat saling menghormati dan tunduk pada hukum yang berlaku. Jika dalam masyarakat agama sudah tidak dianggap memegang peran yang penting, dapat dipastikan kehidupan sosial masyarakat tersebut akan mengalami dekadensi moral dan kekacauan yang nantinya bakal meluas ke lingkup yang lebih luas, yakni bangsa dan negara.

Agama memainkan perannya yang sentral dalam hal kultur maupun kehidupan sosial kemasyarakatannya melalui nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Diantara sekian banyak nilai-nilai yang terdapat dalam agama tersebut, nilai luhur yang paling banyak dan paling relevan dengan sosial kemasyarakatan adalah nilai spiritual yang tetap menjaga agar masyarakat tetap konsisten dalam menjaga stabilitas lingkungan, serta nilai kemanusiaan yang mengajarkan manusia agar dapat saling mengerti satu sama lain, serta dapat saling bertenggang rasa. Saling memahami antar masyarakat merupakan langkah awal yang bagus untuk membentuk masyarakat yang madani. Peran agama semakin kuat ditandai dengan semakin kuatnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diramalkan akan mencabut peran agama dalam masyarakat. Namun ramalan itu ternyata tidak sepenuhnya tepat. Hingga kini kita masih

melihat kecenderungan kuatnya peran agama dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern di kota-kota besar maupun di Kabupaten Kulon Progo khususnya masyarakat pesisir Kulon Progo, misalnya, sesungguhnya menggambarkan adanya kegairahan dalam beragama. Maraknya acara-acara keagamaan dan bermunculannya tokoh-tokoh pendakwah muda menunjukkan adanya permintaan yang sangat besar dari masyarakat pesisir Kulon Progo terhadap otoritas agama. Dapat disimpulkan bahwa semakin modern sebuah masyarakat tidak serta merta menggeser peran agama dalam kehidupan mereka. Walaupun kehidupan masyarakat penuh konflik, ritual ibadah terutama peringatan hari besar keagamaan tetap berjalan seperti sebelum konflik. Dalam hal-hal tertentu memang kita saksikan adanya pergeseran. Fakta bahwa saat ini peran agama belum dapat meredam konflik pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo. Kegiatan atau peringatan hari besar Islam dilakukan oleh kelompok masing-masing.

Dahulu, hampir semua persoalan sosial yang dialami masyarakat biasanya akan dikonsultasikan kepada tokoh agama. Mereka menjadi konsultan dari persoalan publik hingga problem keluarga. Modernisasi kemudian menggeser peran itu. Persoalan sosial tersebut kini sudah terfragmentasi dalam lembaga-lembaga khusus sesuai dengan keahlian dari pengelola lembaga tersebut. Jadi, dalam batas-batas tertentu modernisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan memang telah

menggeser posisi agama. Namun itu tidak serta merta dapat dimaknai bahwa agama akan kehilangan fungsi dan menghilang dengan sendirinya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama memiliki fungsi yang vital, yakni sebagai salah satu sumber hukum atau dijadikan sebagai norma. Agama telah mengatur bagaimana gambaran kehidupan sosial yang ideal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama juga telah memberikan contoh yang konkret mengenai kisah-kisah kehidupan sosio-kultural manusia pada masa silam, yang dapat dijadikan contoh yang sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat di masa sekarang. Kita dapat mengambil hikmah dari dalamnya. Meskipun tidak ada relevansinya dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang sekalipun, setidaknya itu dapat dijadikan pelajaran yang berharga, misalnya agar tidak terjadi konflik pasir besi di masa yang akan datang.

Peran agama dalam meredam konflik pasir besi di Pesisir Kulon Progo belum maksimal, antara lain karena:

- a. Kurangnya komunikasi atau musyawarah antara pihak yang sedang berkonflik, yaitu pihak yang mendukung dan menolak penambangan pasir besi. Tokoh agama dari pihak yang pro dan kontra penambangan mengutamakan kepentingan politisnya dan organisasinya untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu perdamaian. Ulama memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada masyarakat yang sedang berkonflik agar konflik tidak terjadi lagi.

- b. Mediasi, dalam hal ini pemerintahlah yang paling berkompeten sebagai pihak mediator. Pemerintah menghilangkan kepentingan ekonomi dan politisnya dan mengambil posisi netral, tidak berpihak pada yang pro dan pihak yang kontra.

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru. Hal ini berarti bahwa masyarakat pesisir tetap bekerja sebagai petani tetapi juga dituntut untuk melakukan hal-hal baru. Hal baru di sini berarti petani akan mencoba sesuatu yang dianggap baru. Bila hal yang baru lebih banyak memberi manfaat maka akan dikembangkan, tetapi bila lebih banyak memberi kerusakan maka akan ditinggalkan.

Ajaran agama mengkoduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan ibadah.¹ Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat walaupun berbau agama, bukan berarti konflik ini dipicu oleh ketegangan

¹ Muhaimin, *Damai di Dunia, Damai Untuk Semua*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan beragama, 2004)

agama akan tetapi yang paling mempengaruhi adalah faktor-faktor diluar agama sebagai: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan suku. Konflik dari faktor-faktor ini kemudian menjalar ke wilayah agama dan menjadikan konflik ini sebagai konflik agama. Dalam hal ini, agama tidak terlalu berperan mengatasi konflik karena dikesampingkan oleh ego dan identitas kelompok.

Konflik pasir besi di Pesisir Kulon Progo disebabkan perbedaan pandangan yang disebabkan penambangan. Tokoh agama belum berperan untuk mengurangi konflik karena lebih mementingkan ego dan identitas kelompoknya. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat yaitu berfungsi edukatif, penyelamat, perdamaian, sosial control, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif, sebagai tertelan identitas dan ego kelompoknya.

Peran agama dalam meredam konflik pasir besi di Pesisir Kulon Progo akan maksimal, apabila:

- a. Komunikasi atau musyawarah antara pihak yang sedang berkonflik, yaitu pihak yang mendukung dan menolak penambangan pasir besi. Tokoh agama dari pihak yang pro dan kontra penambangan menghilangkan kepentingan politisnya dan organisasinya untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu perdamaian. Ulama memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada masyarakat yang sedang berkonflik agar konflik tidak terjadi lagi.

- b. Mediasi atau ada pihak ketiga sebagai mediator/penengah. Dalam hal ini pemerintahlah yang paling berkompeten sebagai pihak mediator. Pemerintahpun diharapkan menghilangkan kepentingan ekonomi dan politisnya dan mengambil posisi netral, tidak berpihak pada yang pro dan pihak yang kontra dalam mempertimbangkan keputusan akhir. Mediator menawarkan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

Beberapa uraian di atas menghasilkan catatan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang maju (modern), maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan alternatif proses konflik yang diharapkan dapat mengubah watak dan pola pikir masyarakat dalam menggapai dan merealisasikan tujuan nasional (pembangunan) dan pengembangan (peningkatan) taraf hidup.
2. Dalam merealisasikan maksud tersebut, tidak seharusnya melalaikan konsep yang telah diajarkan oleh agama mengenai dasar pemahaman tentang pembangunan (alam/lingkungan) yang tetap memegang etika transendental-religius disamping moral kesusilaan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Karena, predikat *khalifah Allah fi al-ardl* adalah amanah yang dibebankan oleh Allah untuk melestarikan bumi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan sebuah kondisi (tatanan) yang lebih baik.

3. Untuk merealisasikan keinginan terwujudnya negara modern (maju) yang akan mendatangkan kehidupan yang lebih sejahtera lahir maupun batin, maka mengaplikasikan ajaran agama adalah sebuah keharusan yang tak dapat diganggu gugat, disamping harus mampu melahirkan manusia-manusia yang bercirikan dengan watak (tabiat) dan sifat yang sesuai dengan syari'at Islam (sebagaimana yang telah tegas disebut dalam al-Qur'an).
4. Pada dasarnya, manusia selalu membutuhkan bantuan dan uluran tangan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, mereka senantiasa mengadakan interaksi sosial, sehingga akan terwujud sebuah hubungan timbal balik. Interaksi ini suatu ketika akan menimbulkan benturan-benturan, yang tidak menutup kemungkinan justeru menjadi konflik.

Dalam pandangan agama, persangkaan buruk (*su'u al-dlan*) terhadap suatu masalah adalah dilarang (karena termasuk kategori dosa besar). Oleh karena itu, penilaian subyektif yang banyak mendominasi asumsi-asumsi kebanyakan masyarakat terhadap teori konflik harus direkonstruksi, sehingga dapat menghasilkan sebuah analisis yang obyektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga faktor penyebab munculnya konflik pasir besi di pesisir Kulon Progo, yaitu: faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. *Pertama*, faktor ekonomi. Masyarakat di sana mempunyai pemikiran bahwa belum tentu penghasilan sebagai buruh penambang pasir besi itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai petani sebab hasil produksi pertanian mereka jauh lebih tinggi. Penambangan pasir besi akan mengganggu dan mengurangi produksi pertanian mereka yang sudah lama mereka bangun. Contoh lainnya adalah penghapusan lapangan kerja masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kulonprogo di sekitar daerah penambangan.

Kedua, faktor politis. Penambangan ini pun memiliki muatan politis yang sangat jelas terutama prihal keberpihakan kesultanan terhadap pihak swasta, bahkan banyak kabar yang beredar bahwa perusahaan yang menangani penambangan ini berasal dari kerabat kraton. *Ketiga*, faktor perbedaan persepsi mengenai manfaat penambangan. Pihak yang pro mempunyai pandangan bahwa tanah akan semakin subur setelah

dieksplorasi kemudian direklamasi, sebaliknya pihak yang kontra mempunyai pandangan bahwa penambangan akan merusak lingkungan.

Peran agama dalam meredam konflik pasir besi di Pesisir Kulon Progo belum maksimal, antara lain karena kurangnya komunikasi atau musyawarah antara pihak yang sedang berkonflik, yaitu pihak yang mendukung dan menolak penambangan pasir besi. Tokoh agama dari pihak yang pro dan kontra penambangan mengutamakan kepentingan politisnya dan organisasinya. Ulama memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada kelompoknya, tetapi tidak kepada kelompok yang lain.

B. Saran

1. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama sebaiknya menghilangkan image perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat pesisir Kulon Progo. Tokoh masyarakat dan tokoh agama selalu menjadi panutan atau teladan bagi warga sekitarnya. Sikap ingin menang sendiri dalam menyelesaikan konflik, segera diubah menjadi sikap ingin menang bersama, sehingga tercipta kerukunan.
2. Persamaan-persamaan dijadikan sebagai perekat untuk sama-sama bersinergi membangun pesisir Kulon Progo, terutama dalam bidang ekonomi dan politiknya.
3. Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Kulon Progo pada khususnya,

guna membangun kedewasaan beragama-beradat dan ikut mendukung terwujudnya masyarakat dunia yang damai dan rukun di tengah kemajemukan agama, budaya, suku, bangsa dan bahasa. *Wallah A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (Ed). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983
- Abidin, Zainal. *Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000.
- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama, Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Al-Qaradhawi. Yusuf, *Islam Abad 21, Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*. Terj. Samson rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Asy'arie, Musa dkk. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong EraIndustrialisasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakrta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Berlin, Isaiah. *Karl Marx - Riwayat Sang Pemikir Revolusioner*. (Terj. Eri Setiyawan Alkhatab dan Silvester G. Sukur). Yogyakarta: PanjiPustaka, 2007.
- Colleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial*, (Terj. Imam Muttaqien, Derta Sri Widowtie dan Siwi Purwandari). Bandung: Nusa Media, 2008.
- Coser , Lewis, *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. New York: A Division ofMacmillan Publishing Co.Inc. 1964
- Crapps, Robert W. *Dialog Psikologi dan Agama* (Terj. A.M. Hardjana). Yogyakarta: Kanisius 1993.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Konflik*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Data Sensus BPS tahun 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermassa, 1993.
- Enginer, Asghar Ali. *Liberalisasi Teologi Islam, Membangun Teologi Damai Dalam Islam* (Terj. Rizqon Khamami). Yogyakarta: Alenia, 2004.

- Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Adam Kuper, Jessica Kuper; penerjemah, Haris Munandar, Ed.1 Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Giddens, Anthony. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Harian Kompas, Suara Merdeka, Republika, Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja.
- Harskamp, Anton van (Ed). *Conflicts in Social Science* (London: Routledge, 1996, (Terj.) Bern. Hidayat, *Konflik-Konflik Dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Hendropuspito, O.C., D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik, akses 19 Mei 2012
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006, hal. 116.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper, *Ensikloped Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahrudin, "Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, hal 187-204.
- Mash'ud, Mustain, "Dampak Konflik Lingkungan Hidup: Perspektif Sosial, Budaya dan Politik," *Jurnal Sosial-Politika*, Vol. 15, No. 2, Desember 2008, hal 195-214.
- O'dea, Thomas F. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer* (Terj. Yasogama). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Pruitt, Dean G. dan Rubin Jeffrey Z. *Teori Konflik Sosial* (Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Purwantono, Bambang, “Kekerasan dan Kriminalitas pada masa Transisi,” makalah pada The 1st International Conference on Urban History, Surabaya, 2004.
- Purwantono, Bambang, “Kekerasan dan Kriminalitas pada masa Transisi,” makalah pada The 1st International Conference on Urban History, Surabaya 23-25 Agustus 2004.
- Raden, Ince, dkk., “Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jakarta: BPP, Kementerian Dalam Negeri, 2010.
- Robertson, Roland, ed. *Agama : Dalam Analisa dan Intepretasi Sosiologis* (Terj. Achmad Fedyani Saifuddin). Jakarta: Rajawali, 1988.
- Scharf, Betty R. *Sosiologi Agama* (Terj. Machnun Husein). Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Semiawan, Conny R. dkk. *Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- . *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Subkhan, Imam, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Cetakan ke-5 Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2009.
- Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Syamsi, Ibnu, “Potensi Konflik Sosial Masyarakat di Kelurahan Condong Catur Yogyakarta”, *Jurnal Fondasia*, No. 9/Vol.I/Tahun VIII/ 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam – Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber* (Terj. A.G. Ticoalu). Jakarta: Rjawali, 1984.
- Wahid, Abdurrahman. *Agama dan Kekerasan, Dari Anarkhisme Politik Ke Teologi Kekerasan*. Jakarta: PP-IPNU, 1998.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama* (Terj. Muhammad Yamin). Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Williams, Howard, *Filsafat Politik Kant*, Penerjemah: Muhammad Hardani, Surabaya: JP-Press, 2003.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.